

A. Urusan Konkuren

**B. Ringkasan Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
(Perencanaan, Keuangan, Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan,
Penelitian dan Pengembangan, Inspektorat dan Fungsi Penunjang
lainnya) (-)**

C. Ringkasan Urusan Pemerintahan Umum (Kesbangpol)

1. Perangkat Daerah Pelaksana.

Adalah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Nusa Tenggara Timur.

2. Program dan Kegiatan.

**2.1 Program Pengelolaan Perbatasan, Pembinaan Politik Dan
Perlindungan Masyarakat.**

**2.1.1 Kegiatan Penguatan Pokja Indeks Demokrasi Indonesia Tingkat
Provinsi.**

- Terlaksananya Seminar Akhir Pokja IDI Tahun Anggaran 2018, pada hari Selasa, 27 Agustus 2019, bertempat di Aula Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi NTT. Peserta berjumlah 50 (lima puluh) orang, yang terdiri dari Partai Politik: 10 Orang, Tokoh Agama : 2 Orang, Tokoh Masyarakat : 7 Orang, Akademisi : 3 Orang, Organisasi Kepemudaan: 2 Orang , dan Mahasiswa : 2 Orang, Anggota Pokja IDI : 6 Orang, Instansi terkait : 18 orang.

Hasilnya adalah : Berdasarkan rilis hasil IDI tahun 2018 pada tanggal 1 Agustus 2019 oleh BPS Pusat, maka IDI NTT Tahun 2018 berhasil menempati peringkat 3 Nasional dengan capaian 82,32 poin dengan kategori ‘**Baik**’. Bahwa capaian hasil IDI NTT tahun 2018 yang menempatkan NTT berada pada peringkat 3 (tiga) terbaik Nasional, bukan saja dimaknai sebagai suatu kemajuan berdemokrasi NTT tetapi perlu diwujudkan dalam sikap dan perilaku sesuai karakteristik dan budaya politik

masyarakat NTT. Selain itu pula hasil IDI tersebut tidak sekedar angka-angka tetapi perlu diimplementasikan dan dimanfaatkan oleh Pemerintah Daerah dan semua elemen strategis masyarakat terutama berkaitan dengan perencanaan program dan kegiatan pembangunan demokrasi politik pada semua tatanan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, karena itu peserta berkomitmen untuk mempertahankan capaian hasil IDI yang sudah diperoleh dan bahkan bersinergi untuk meningkatkan capaian indikator hasil IDI NTT tahun 2018 yang berkategori Buruk menjadi kategori Sedang bahkan menuju kategori Baik pada tahun-tahun mendatang.

- Terlaksananya Ekspose hasil Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Provinsi NTT Tahun 2018, pada hari Jumat, 6 September 2019, bertempat di Aula Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi NTT. Peserta berjumlah 50 (lima puluh) orang, yang terdiri dari Partai Politik: 10 Orang, Tokoh Agama : 2 Orang, Tokoh Masyarakat : 7 Orang, Akademisi : 3 Orang, Organisasi Kepemudaan : 2 Orang, dan Mahasiswa : 2 Orang, Anggota Pokja IDI : 6 Orang, Instansi terkait : 18 orang. Pelaksanaan kegiatan ini menghasilkan 1) Peserta berkomitmen menjadi corong pemerintah dan Pokja IDI NTT untuk mengedukasi dan mengadvokasi masyarakat di lingkungan kerjanya masing-masing terkait pentingnya pemanfaatan hasil IDI bagi perencanaan pembangunan demokrasi politik sebagaimana informasi dan masukan yang diperoleh melalui kegiatan Ekspose ini baik di tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota. 2) Peserta juga mengharapkan agar capaian hasil IDI NTT tahun 2018 hendaknya dipublikasikan melalui media massa (cetak dan sosial media lainnya) sehingga makna IDI semakin dipahami secara luas. 3) Pemerintah dan Seluruh Elemen strategis terus meningkatkan komunikasi, kerjasama dan membangun sinergitas sehingga mampu mempertahankan hasil IDI 2018 sekaligus terus berupaya untuk meningkatkan capaian indikator IDI NTT yang masih berkategori Buruk dan kategori *Sedang* menjadi kategori *Baik*. 4) Bahwa output dari kegiatan ini perlu dituangkan dalam Rencana Aksi (RA) serta dilaksanakan secara

bertanggungjawab sesuai tugas pokok dan fungsi masing-masing, baik pemerintah, lembaga sipil, media massa, perguruan tinggi, kelompok mahasiswa dan masyarakat sipil lainnya. 5) Aspek Kebebasan Sipil (*civil libertis*) di Nusa Tenggara Timur menempati posisi yang sangat baik karena dukungan nilai-nilai sosial-budaya antara lain : nilai tolong-menolong, nilai kekeluargaan karena civil sociaty sebagai pilar demokrasi dan nilai persaudaraan.

- Terlaksananya Kegiatan Desiminasi Hasil IDI di 6 (enam) Kabupaten yaitu Kabupaten TTS, TTU, Belu, Alor, Ende, Rote Ndao.

Hasilnya adalah terinformasinya hasil rilis IDI NTT tahun 2018 ke 6 (enam) Kabupaten mengingat hasil survey data IDI lebih banyak diambil dari Kabupaten / Kota, sedangkan Pemerintah Kabupaten / Kota belum melakukan kegiatan IDI. 6 (enam) Kabupaten tersebut dapat memakai hasil IDI sebagai perencanaan pembangunan politik di daerahnya masing-masing. Data yang diinformasikan ke 6 (enam) Kabupaten tersebut adalah :

Perkembangan Indeks Aspek, Variabel dan Skor Indikator IDI 2017-2018.

A	KEBEBASAN SIPIL (CIVIL LIBERTIES)	2017	2018
I	Kebebasan berkumpul dan berserikat	12.50	97.66
1	Ancaman kekerasan atau penggunaan kekerasan oleh aparat pemerintah yang menghambat kebebasan berkumpul dan berserikat.	00	100
2	Ancaman kekerasan atau penggunaan kekerasan oleh masyarakat yang menghambat kebebasan berkumpul dan berserikat.	100.00	81.25
II	Kebebasan berpendapat	50.00	93.74
3	Ancaman kekerasan atau penggunaan kekerasan oleh aparat pemerintah yang menghambat kebebasan berpendapat.	50.00	100.00
4	Ancaman kekerasan atau penggunaan kekerasan oleh masyarakat yang menghambat kebebasan berpendapat.	50.00	62.50
III	Kebebasan berkeyakinan	96.26	100.00
5	Aturan tertulis yang membatasi kebebasan atau mengharuskan masyarakat dalam menjalankan Agamanya	100	100.00
6	Tindakan atau pernyataan pejabat Pemerintah yang membatasi kebebasan atau mengharuskan	90.63	100.00

	masyarakat untuk menjalankan ajaran agamanya		
7	Ancaman kekerasan atau penggunaan kekerasan dari satu kelompok masyarakat terhadap kelompok masyarakat lain terkait dengan ajaran agama	85.00	100.00
IV	Kebebasan dari diskriminasi	74.38	78.14
8	Aturan tertulis yang diskriminatif dalam hal gender, etnis atau terhadap kelompok rentan lainnya	100.00	100.00
9	Tindakan atau pernyataan pejabat pemerintah daerah yang diskriminatif dalam hal gender, etnis atau terhadap kelompok rentan lainnya	37.50	90.63
10	Ancaman kekerasan atau penggunaan kekerasan oleh masyarakat karena alasan gender, etnis atau terhadap kelompok rentan lainnya	75.00	41.67
B	HAK-HAK POLITIK (POLITICAL RIGHTS)	69.75	71.85
V.	Hak memilih dan dipilih	73.75	75.22
11	Hak memilih atau dipilih masyarakat terhambat	96.79	96.79
12	Kejadian yang menunjukkan ketiadaan/kekurangan fasilitas sehingga kelompok dengan keterbatasan akses tidak dapat menggunakan hak memilih	60.00	60.00
13	Kualitas daftar pemilih tetap (DPT)	75.14	75.14
14	Penduduk yang menggunakan hak pilih dibandingkan dengan yang memiliki hak untuk memilih dalam pemilu (voters turnout)	76.56	76.56
15	Persentase Anggota Perempuan DPRD provinsi	30.77	46.15
16	Demonstrasi/mogok yang bersifat kekerasan	31.52	36.96
17	Pengaduan masyarakat mengenai penyelenggaraan pemerintahan	100.00	100.00
C	LEMBAGA-LEMBAGA DEMOKRASI (DEMOCRATIC INSTITUTIONS)	79.39	84.28
VII.	Pemilu yang bebas dan adil	97.47	97.47
18	Kejadian yang menunjukkan keberpihakan KPUD dalam penyelenggaraan Pemilu	100.00	100.00
19	Kejadian atau pelaporan tentang kecurangan dalam penghitungan suara	94.94	94.94
VIII.	Peran DPRD	61.63	67.28
20	Skor alokasi anggaran Pendidikan dan Kesehatan	74.97	76.24
21	Perda yang berasal dari hak inisiatif DPRD	57.14	92.31
22	Rekomendasi DPRD kepada eksekutif	17.86	14.29
IX.	Peran Partai politik	100.00	100.00
23	Kegiatan kaderisasi yang dilakukan parpol peserta pemilu	100.00	100.00
24	Persentase perempuan pengurus partai politik	100.00	100.00
X	Peran Birokrasi Pemerintah Daerah	65.35	60.82
25	Kebijakan pejabat pemerintah daerah yang dinyatakan bersalah oleh keputusan PTUN	73.68	73.68

26	Upaya penyediaan informasi APBD oleh pemerintah daerah	58.33	50.00
XI	Peran Peradilan yang independen	100.00	100.00
27	Keputusan hakim yang kontroversial	100.00	100.00
28	Penghentian penyidikan yang kontroversial oleh jaksa atau polisi	100.00	100.00

2.1.2 Kegiatan Peningkatan Wawasan Kebangsaan.

2.1.2.1 Lomba Pidato Empat Konsensus Nasional Bagi Pelajar SLTA Kabupaten/Kota se Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2019.

- Terlaksananya Kegiatan Lomba Pidato pada tanggal 12 dan 13 Agustus 2019, bertempat di Hotel Naka Jalan Frans Seda 21 Kupang- Nusa Tenggara Timur. Peserta yang hadir dari 6 (enam) Kabupaten yaitu Kabupaten TTU, Sabu Raijua, Sumba Barat, Sumba Barat Daya, Lembata dan Sumba Timur dan masing-masing Kabupaten terdiri dari 1 orang pelajar SMA, 1 orang guru pendamping, 1 orang Badan Kesbangpol Kabupaten. Tema Lomba adalah “ Kita Wujudkan Sumber Daya Manusia Unggul Indonesia Maju dan Berkarakter Nasional”. Hasilnya adalah 1). Pelajar SMA sebagai generasi muda memahami nilai-nilai kebangsaan sehingga dalam kehidupannya dapat mewujudkan bangsa dan Negara yang adil, makmur, sejahtera dan bermartabat. 2). Dengan pengamalan nilai - nilai Empat Konsensus Nasional, maka para pelajar SLTA sebagai generasi millennial harapan bangsa dapat menumbuhkembangkan rasa cinta tanah air, jiwa nasionalisme dan patriotisme, selalu mengembangkan kehidupan demokrasi, menjaga persatuan dan kesatuan, kerukunan serta keutuhan bangsa dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. 3) Ditetapkan juara Lomba Pidato Tingkat Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagai berikut:

No	Kriteria Juara	Nama/ Asal SMA	Kabupaten	Total Nilai
1	Juara I	Swesti Lesgi S. Taga/ PGRI WINIRAI	Sabu Raijua	86.33
2	Juara II	Kristina E. U.Lajar/ SMA Frater Don Bosco Lewoleba	Lembata	83,33
3	Juara III	Archangela Z. Hardin/ SMA I Kefamenanu	TTU	82,17

4	Juara harapan I	Aurelia Claudia Riasti/ SMAN 1 RINDI Umalulu	Sumba Timur	81.33
5	Juara harapan II	Cornelia L. T. Boro	Sumba Barat	81.11
6	Juara harapan III	Anastasia Jeni Ngara/ SMA Negeri I Kodi SBD	Sumba Barat Daya	81.03

2.1.2.2 Dialog Interaktif Radio dan TVRI Lokal.

- Terlaksananya Dialog di TVRI Kupang pada tanggal 14 Agustus 2019, dengan Narasumber Gubernur NTT.
- Terlaksananya Dialog di RRI Kupang pada tanggal 26 September 2019, dengan Narasumber Kepala Bidang Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi NTT.
- Terlaksananya Dialog TVRI Kupang pada tanggal 6 Desember 2019, dengan Narasumber Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi NTT.

Thema dialog adalah Menjaga Nilai Integritas, Etos Kerja dan Gotong Royong Menuju Indonesia Maju.

Hasilnya adalah terlaksananya dialog dalam upaya menjaga nilai integritas, etos kerja dan gotong royong menuju Indonesia maju yang membutuhkan partisipasi aktif seluruh elemen masyarakat NTT sebagai warga Negara Indonesia, sekaligus upaya menanamkan dan menumbuhkan nilai-nilai tersebut sejak dini bagi generasi penerus bangsa dalam mewujudkan persatuan dan kesatuan Bangsa Indonesia.

2.1.2.3 Sosialisasi wawasan kebangsaan pada Wilayah Perbatasan Antar Negara.

- Terlaksananya Sosialisasi wawasan kebangsaan pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2019, bertempat di Desa Maritaing Kecamatan Alor Timur.
- Terlaksananya Sosialisasi wawasan kebangsaan pada hari Jumat tanggal 19 Juli 2019, bertempat di Kecamatan Kobalima Kabupaten Malaka.

Peserta sosialisasi masing-masing berjumlah 70 (tujuh puluh) orang terdiri dari generasi milenial / generasi muda (Pelajar : 9 orang, Tokoh Muda Agama/ Pemuda/i Gereja : 15 orang, Tokoh Pemuda/i : 36 orang), Guru : 5 orang, dan Instansi terkait lingkup Pemerintah Kecamatan: 5 orang.

Hasilnya adalah : 1). Peserta dapat memahami nilai-nilai luhur yang

terkandung dalam Empat Konsensus Kebangsaan yaitu Pancasila, UUD' 1945, NKRI dan Bhineka Tunggal Ika yang harus diwujudkannyatakan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. 2). Meningkatnya rasa nasionalisme serta patriotisme peserta. 3). Pernyataan sikap kebangsaan Sejuta Cinta Generasi Milenial dari perbatasan antar Negara.

2.1.2.4 Kegiatan Forum komunikasi Revitalisasi Pancasila.

- Terlaksananya kegiatan pada hari Selasa, tanggal 30 April 2019 di Ende Kabupaten Ende. Peserta berjumlah 90 orang yang terdiri dari Aparat Badan Kesbangpol Kabupaten Ende, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh perempuan, tokoh pemuda, pengurus partai politik, Ormas, LSM, mahasiswa dan Pelajar di Kabupaten Ende, dengan hasil kegiatan adalah Adanya komitmen Peserta dengan rekomendasi sebagai berikut:
 - Penguatan kapasitas masyarakat melalui penanaman nilai-nilai luhur Pancasila sebagai idiologi negara, yang dimulai dari keluarga.
 - Pemerintah perlu membangun Rumah Pancasila dalam memperkuat literasi Pancasila.
 - Rencana Aksi Revitalisasi nilai-nilai Pancasila dimulai dari Pendidikan dalam dan luar sekolah, Ormas/NGO di setiap wilayah Provinsi NTT.
 - Mengumandangkan lagu Indonesia Raya dua kali sehari di tempat umum dan tempat aktifitas lainnya (Telah dikeluarkan Surat Gubernur NTT Nomor: BU.003/126/KESBANGPOL/2019, tanggal 17 Mei 2019, kepada Para Bupati se NTT, Walikota Kupang serta kepada seluruh Pimpinan OPD/ Instansi vertical/ BUMN/BUMD/Perusahaan Swasta/ Pimpinan Organisasi Lingkup Provinsi NTT).
 - Peringatan HUT RI dimeriahkan sampai ke tingkat Dusun.

2.1.2.5 Kegiatan Forum Desiminasi Pemantapan Wawasan Kebangsaan di Kabupaten Sumba Timur, Alor, Manggarai Barat.

- Terlaksananya kegiatan Forum Desiminasi Pemantapan Wawasan Kebangsaan di Kabupaten Sumba Timur, pada tanggal 11 Pebruari 2019.

- Terlaksananya kegiatan Forum Desiminasi Pemantapan Wawasan Kebangsaan di Kabupaten Alor, pada hari Kamis tanggal 23 Mei 2019.
- Terlaksananya kegiatan Forum Desiminasi Pemantapan Wawasan Kebangsaan di Kabupaten Manggarai Barat pada pada hari Jumat tanggal 20 Juni 2019.

Peserta masing-masing kegiatan berjumlah 70 orang yang terdiri dari tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh perempuan, tokoh pemuda, guru, para pelajar, pengurus parpol, Ormas/LSM, Instansi terkait lingkup Pemerintah Kabupaten. Hasil kegiatan adalah : 1). Adanya pemahaman Peserta tentang pentingnya wawasan kebangsaan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. 2). Adanya pemahaman yang sama bahwa Pancasila adalah satu-satunya ideologi bangsa Indonesia dan karenanya tidak ada ideologi lain selain Pancasila. 3). Khusus di Kabupaten Manggarai Barat, merekomendasikan siap untuk menjadi “Laboratorium Wawasan Kebangsaan untuk Indonesia”, sehubungan dengan keteguhan masyarakat Manggarai Barat pada nilai-nilai persaudaraan, kekeluargaan dan kegotongroyongan.

2.1.2.6 Dialog pengaruh ideologi lain terhadap ideologi Pancasila lintas generasi.

- Terlaksananya Dialog tersebut di Ende Kabupaten Ende pada hari Selasa tanggal 19 November 2019. Peserta berjumlah 70 orang yang terdiri dari tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh perempuan, tokoh pemuda, guru, para pelajar, pengurus parpol, Ormas/LSM, Instansi terkait lingkup Pemerintah Kabupaten . Hasil kegiatan adalah 1) Peserta dapat memahami pentingnya Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan dimaknai dalam berbagai dimensi kehidupan berbangsa dan bernegara. 2) Peserta dapat memahami nilai-nilai luhur bangsa sebagai panduan kehidupan dalam mewujudkan masyarakat yang adil, makmur, sejahtera dan bermartabat. 3) Meningkatnya rasa nasionalisme dan patriotisme generasi millenial untuk berpartisipasi aktif menjaga negeri ini dari upaya-upaya menggantikan ideologi pancasila dengan ideologi lain.

2.1.3 Kegiatan Penguatan Kelembagaan FKUB, FPK dan FKDM

2.1.3.1 Penguatan Kelembagaan FKUB.

- Terlaksananya Rapat Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Provinsi Nusa Tenggara Timur Caturwulan I, pada hari Selasa, tanggal 12 Maret 2019, bertempat di Gedung Sekretariat FKUB, dengan agenda : Persiapan Rakor Peningkatan dan Pembinaan Ketahanan Agama Tingkat Provinsi dan Kabupaten Kota Tahun 2019 yang direncanakan akan dilaksanakan di Kabupaten Ende. Peserta dihadiri oleh 24 orang. Hasilnya adalah adanya konsep/skenario rapat koordinasi.
- Terselenggaranya Rapat Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Provinsi Nusa Tenggara Timur Caturwulan II, pada tanggal 15 Juni 2019, dihadiri oleh 18 orang terdiri dari anggota FKUB dan sekretariat FKUB, bertempat di Gedung Sekretariat FKUB. Hasilnya adalah adanya konsep/instrumen untuk anggota melakukan perjalanan Dinas monitoring dan penguatan FKUB di Kabupaten/Kota se NTT dengan prioritas daerah yang rawan konflik dan daerah yang akan menyelenggarakan Pilpres dan Pileg serentak.
- Terlaksananya Rapat Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Provinsi Nusa Tenggara Timur Caturwulan III, pada tanggal 4 September 2019, bertempat di Ruang Rapat Badan Kesbangpol Provinsi NTT. Peserta Rapat 18 orang terdiri dari anggota FKUB Provinsi NTT dan sekretariat FKUB. Hasilnya adalah :
 - Sinergi Rakor dengan Forum yang lain (FPK, FKDM) dan pelaksanaannya pada tanggal 13 September 2019.
 - Rekomendasi rakor harus ada tindakan aksi.
 - Adanya konsep / saran tema.
- Terlaksananya Rapat Kerja Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota se Nusa Tenggara Timur Tahun 2019 di Aula Hotel Sasando Kota Kupang pada tanggal 13 September 2019. Diikuti oleh Anggota FKUB serta Sekretariat Tk. Provinsi, Anggota FKUB Tk. Kabupaten/Kota, Kepala Badan Kesbangpol Kabupaten/Kota sebanyak 60 orang. Hasil Rekomendasi Rapat Kerja FKUB adalah :
 - FKUB diharapkan dapat memperbanyak intensitas dialog dengan memperluas kelompok kategorial dan diperkaya dengan bentuk kegiatan yang bervariasi .
 - Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/ Kota mendorong dan memfasilitasi terbentuknya FKUB sampai

ditingkat Kecamatan bahkan sampai di tingkat Desa/ Kelurahan dengan tetap memperhatikan ketentuan yang berlaku.

- Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi dan Kabupaten/ Kota diharapkan dapat memberi dukungan bagi keberlangsungan kerukunan umat beragama dan merawat persatuan dan kesatuan bangsa di Nusa Tenggara Timur, dengan tetap memperhatikan ketentuan perundang-undangan dan kemampuan keuangan daerah.
- Penguatan Kelembagaan FKUB di Kabupaten/Kota.
Terlaksananya Kegiatan Penguatan FKUB di 6 Kabupaten/ Kota (Kota Kupang, Kabupaten Sumba Barat Daya, Alor, Ende, Manggarai Barat dan Rote Ndao) dengan hasil terwujudnya penguatan FKUB Kabupaten/Kota melalui sinergi program/kegiatan dan pemberian penghargaan berupa honor kepada 21 (dua puluh satu) orang anggota FKUB Provinsi NTT.

2.1.3.2 Penguatan Kelembagaan FKDM

- Terlaksananya Rapat Anggota Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat Tingkat Provinsi NTT ke I, pada tanggal 17 Juli 2019, bertempat di ruang kerja Kepala Badan Kesbangpol Provinsi NTT. Peserta rapat adalah anggota Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat dan sekretariat FKDM. Hasil rapat adalah 1). Forum harus mempunyai data dan informasi. 2). Memaksimalkan peran dan fungsi FKDM dengan perluasan jejaring kerja. 3). Bersinergi program dengan FPK dan FKUB .
- Terlaksananya kegiatan rapat Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) tingkat Provinsi Nusa Tenggara Timur ke II, pada tanggal 9 Agustus 2019, bertempat di ruang kerja Kepala Badan Kesbangpol Provinsi NTT. Peserta rapat adalah : anggota Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat Tingkat Provinsi Nusa Tenggara Timur dan sekretariat FKDM. Hasilnya adalah 1). FKDM siap menciptakan situasi yang kondusif dalam rangka upacara peringatan HUT Proklamasi Kemerdekaan RI pada tanggal 17 Agustus 2019. 2). Adanya konsep / skenario Rapat Koordinasi Forum-Forum (FPK, FKUB, FKDM) Kabupaten/Kota dan Provinsi NTT. 3). Terkait masalah penyerangan mahasiswa Papua di Malang, Surabaya dan Semarang, maka perlu diberikan pemahanan

kepada generasi masa kini tentang pentingnya memupuk persatuan dengan menanamkan nilai kebersamaan dan saling menghargai meskipun berbeda, tapi kita tetap satu karena ada yang mengikat kita yaitu Pancasila. 4) Kita harus tetap menjaga agar jangan sampai NTT terprovokasi dengan berbagai isu-isu yang mengarah kepada perpecahan. 5). Kaitan dengan belum terbentuknya Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) di Kabupaten Malaka, maka perlu anggota Tim FKDM Provinsi melakukan penguatan ke Pemerintah Kabupaten Malaka dan sekaligus melakukan sosialisasi tentang pentingnya pemerintah kabupaten bermitra dengan Forum-Forum guna bersama-sama melakukan fungsi Kewaspadaan Dini terhadap berbagai macam bentuk ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan yang akan mengancam keamanan daerah.

- Terlaksananya kegiatan rapat Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) tingkat Provinsi Nusa Tenggara Timur ke III, pada hari Jumat, tanggal 6 September 2019, bertempat di ruang kerja Kepala Badan Kesbangpol Provinsi NTT. Peserta rapat adalah Anggota FKDM dan Sekretariat FKDM. Hasilnya adalah 1) Adanya komitmen FKDM untuk mendukung Visi, Misi Gubernur dan Wakil Gubernur NTT serta program kerja Badan Kesbangpol Provinsi NTT, khususnya dalam menjaga Negara Kesatuan Republik Indonesia agar tetap aman dan kondusif. 2) Kaitan dengan hal di atas, Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) mengharapkan agar Program strategis yang telah dibuat oleh Gubernur dan Wakil Gubernur NTT harus benar - benar diimplementasikan sampai menyentuh kebutuhan masyarakat. 3) Perlu dilakukan kajian yang mendalam terkait fenomena akhir-akhir ini, banyak peneliti dari luar daerah yang sering melakukan penelitian dan kajian hanya terfokus di satu Kabupaten. 4) Dalam rangka Kewaspadaan Nasional, maka perlu pelibatan semua institusi untuk meningkatkan semangat kebersamaan dengan seluruh tokoh agama dan tokoh pemuda (GMNI, GMKI, PMKRI, HMI) agar dapat membangun pemahaman yang sama dalam meningkatkan Kewaspadaan Dini terkait dengan ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan (ATHG). 5) Rapat Kerja Forum-Forum (FKDM, FKUB, FKDM) Kabupaten/Kota se NTT perlu disinergikan pelaksanaannya agar

peran masing-masing forum sebagai mitra pemerintah dapat berjalan maksimal dan direncanakan pelaksanaannya pada tanggal 13 September 2019.

- Terlaksananya kegiatan Rapat Kerja Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) tingkat Provinsi Nusa Tenggara Timur pada hari Jumat, 13 September 2019, bertempat di Aula Hotel Sasando-Kota Kupang. Peserta rapat berjumlah 60 orang terdiri dari Badan Kesbangpol Provinsi, Ketua FKDM Kabupaten/Kota, Anggota FKDM Tingkat Provinsi NTT, Dit Intelkam Polda NTT, Kasi Intel Korem 161/WS, Binda NTT. Hasilnya adalah 1). Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) sebagai wadah deteksi dini berkewajiban memberikan informasi kepada pemerintah daerah berkaitan dengan berbagai potensi konflik, bencana (banjir, kekeringan) maupun ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan (ATHG). 2). Pembentukan FKDM sampai ke tingkat kecamatan. 3). Pemerintah Kabupaten/Kota perlu memberi dukungan dan perhatian kepada FKDM Tingkat Kabupaten/Kota.
- Penguatan Kelembagaan FKDM di Kabupaten/Kota.
 - 1). Pelaksanaan Penguatan di Kabupaten TTS, Ngada, Flores Timur, Malaka, Sumba Barat Daya, Sumba Timur. Hasilnya adalah terwujudnya penguatan FKDM di 6 Kabupaten yaitu :
 - Mendorong pembentukan FKDM sampai ke tingkat kecamatan;
 - Mendorong Kabupaten Malaka membentuk FKDM;
 - Sosialisasi dan sinergi program dan kegiatan.
 - 2). Pemberian penghargaan berupa honor kepada 5 (lima) anggota FKDM Provinsi NTT.

2.1.3.3 Penguatan Kelembagaan FPK.

- 1). Penguatan Kelembagaan FPK di 8 (delapan) Kabupaten dengan hasil:
 - Mendorong pemerintah Kabupaten Malaka membentuk OPD Kesbangpol sehingga dapat fasilitasi pembentukan Forum-Forum yang akan menjadi Mitra Pemerintah. Hasilnya Pemerintah Kabupaten Malaka telah membentuk Perangkat Daerah Badan Kesbangpol.

- Pemerintah Kabupaten Alor mendukung dan fasilitasi FPK Kabupaten Alor untuk meningkatkan perannya dalam menjaga persatuan dan kesatuan masyarakat di Kabupaten Alor.
- Mendorong FPK di Kabupaten Sabu Raijua untuk memaksimalkan perannya sesuai PERMEN Nomor 34 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pembauran Kebangsaan di Daerah.
- Mendorong pemerintah Kabupaten Manggarai Barat, Rote Ndao, Sikka, TTU, dan TTS untuk memberi perhatian dan fasilitasi FPK yang sudah terbentuk sehingga dapat melaksanakan tugas dan fungsinya.

2). Pemberian penghargaan berupa honor kepada anggota FPK.

- Terlaksananya Rapat Koordinasi Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) Tingkat Provinsi Nusa Tenggara Timur ke I, pada hari Jumat, tanggal 5 April 2019, bertempat di Ruang Rapat Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Nusa Tenggara Timur. Peserta rapat adalah : anggota Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) dan Sekretariat FPK Provinsi NTT. Hasilnya adalah :
 - FPK perlu memberi perhatian dan menjaga hubungan antar ras, etnik, suku, agama dan golongan serta asal daerah menjelang pelaksanaan Politik di Daerah.
 - Mendorong pemerintah menyelesaikan Pembangunan Monumen Pancasila.
 - Terinformasinya kegiatan – kegiatan yang akan dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2019.
 - Pergantian anggota FPK yang tidak aktif.
- Terselenggaranya rapat koordinasi FPK Provinsi Nusa Tenggara Timur ke II, pada tanggal 10 April 2019, bertempat di Ruang Rapat Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Nusa Tenggara Timur. Peserta rapat adalah anggota Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) dan sekretariat FPK Provinsi NTT. Hasilnya adalah : Perlunya pemahaman bagi Komunitas dalam Wilayah NTT dalam menjaga persatuan dan kesatuan sebagai sesama anak bangsa.
- Terselenggaranya rapat koordinasi FPK Provinsi Nusa Tenggara Timur ke III, pada tanggal 5 September 2019, bertempat di Ruang

Rapat Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Nusa Tenggara Timur. Peserta rapat adalah anggota FPK dan secretariat FPK Provinsi Nusa Tenggara Timur, serta Ketua FPK Kabupaten Sabu Raijua. Hasilnya adalah :

Penetapan waktu dan skenario Rapat Koordinasi Forum Pembauran Kebangsaan dengan Para Kepala Badan Kesbangpol Kab/Kota serta Forum Pembauran Kebangsaan Kabupaten/Kota pada Minggu ke 3 bulan September 2019.

- Terselenggaranya rapat kerja FPK Provinsi Nusa Tenggara Timur pada tanggal 13 September 2019, bertempat di Aula Hotel Sasando - Kota Kupang. Peserta rapat terdiri dari Anggota FPK Tingkat Provinsi, Ketua FPK Kabupaten/Kota, Ketua-ketua etnis di NTT. Hasilnya adalah : Adanya rekomendasi sebagai berikut : 1). Pembangunan monument Pancasila dilanjutkan sesuai kemampuan keuangan daerah; 2). Perlu dilakukan pertemuan antar lintas generasi dan etnis pada setiap HUT Kemerdekaan RI diseluruh NTT; 3). Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota mendorong dan memfasilitasi terbentuknya FPK sampai di tingkat Kecamatan, bahkan sampai di tingkat Desa / Kelurahan dengan tetap memperhatikan ketentuan yang berlaku; 4). Pemerintah daerah dan DPRD Provinsi dan Kabupaten/ Kota diharapkan dapat memberi dukungan bagi keberlangsungan pembauran kebangsaan dalam menjaga dan merawat persatuan dan kesatuan bangsa di NTT.

2.1.4 Kegiatan Penyuluhan Peraturan Perundang-undangan Politik.

2.1.4.1 Pemantauan Pra Pileg dan Pilpres Tahun 2019.

- Terlaksananya kegiatan Pemantauan Pra Pileg dan Pilpres Tahun 2019, di 22 Kabupaten/Kota. Hasilnya adalah Pemerintah Kabupaten/Kota se Provinsi Nusa Tenggara Timur terus melakukan berbagai langkah-langkah antisipatif terhadap perkembangan dinamika masyarakat di Daerah antara lain : 1). Pemetaan lokasi-lokasi rawan konflik sosial sekaligus melakukan pemantauan secara kontinyu. 2). Rapat-rapat koordinasi dengan Forum-forum terkait yaitu FKUB, FPK, FKDM dan Kominda dalam rangka mengantisipasi secara dini kemungkinan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. 3). Menggelar forum-forum dialog dengan pimpinan Partai

Politik, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat serta penyelenggara Pemilu (KPU dan Bawaslu) dalam rangka rekonsiliasi harmonisasi sosial kemasyarakatan yang rukun dan harmonis. 4). Secara umum, perkembangan situasi dan kondisi sosial politik masyarakat di Kabupaten / Kota se Provinsi Nusa Tenggara Timur Pra Pemilu Serentak tanggal 17 April 2019 (H-7) berdasarkan hasil monitoring dan koordinasi dengan instansi terkait tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota, masih tetap kondusif, artinya tidak terjadi tindakan-tindakan instabilitas di daerah yang dapat diduga menciderai stigma Luber dan Jurdil dalam Pemilu Serentak Tahun 2019 walaupun hasil rekapitulasi perolehan suara Pemilu Serentak Tahun 2019 telah dipublikasikan di tingkat TPS dan PPK. 5). Kekurangan Logistik di beberapa TPS di tingkat Kecamatan masih terus diupayakan distribusinya.

2.1.4.2 Pemantauan Kegiatan Pasca Pileg dan Pilpres Tahun 2019.

1. Kegiatan Pasca Pemungutan Suara Tanggal 17 April 2019.

Hasil kajian Bawaslu Kabupaten/Kota se Provinsi Nusa Tenggara Timur terkait dengan proses Pemungutan Suara Pemilu Serentak tanggal 17 April 2019, di rekomendasikan kepada 18 KPU Kabupaten/Kota se Provinsi NTT untuk melakukan Pemungutan Suara Lanjutan (PSL), Pemungutan Suara Ulang (PSU) pada tanggal 27 April 2019, dengan rincian :

No	Kabupaten / Kota	PSL	PSU	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih/ Orang
1	Sikka	✓		5	855
2	Kota Kupang		✓	3	707
No	Kabupaten / Kota	PSL	PSU	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih/ Orang
3	Kupang	✓		3	768
4	TTS	✓		12	2.041
5	TTU	✓		1	237
6	Belu	✓		1	139
7	Malaka	✓		2	471
8	Lembata	✓		2	379
9	Ende	✓		3	488
10	Ngada	✓		1	245
11	Nagekeo	✓		2	458
12	Manggarai	✓		5	1.236

13	Manggarai Barat	✓		2	325
14	Sumba Timur	✓		5	1.245
15	Sumba Tengah	✓		1	178
16	Sumba Barat Daya	✓		1	231
17	Rote Ndao	✓		1	191
18	Sabu Raijua	✓		2	425

2. Data Perolehan Suara Pemilu Serentak Kabupaten Kota se Provinsi NTT.

Tingkat partisipasi politik pemilih pada Pemilu Serentak Tahun 2019 di Kabupaten/Kota se NTT sangat variatif, namun cukup signifikan bila dibandingkan dengan Pemilu/Pilkada sebelumnya karena prosentase partisipasi politik masyarakat semua Kabupaten/Kota menembus diatas rata-rata nasional yaitu 75,00 persen. Data partisipasi politik Pemilu Serentak Tahun 2019 di Kabupaten/Kota se NTT :

No.	Kabupaten/Kota	Jumlah Pemilih	Suara Masuk /Partisipasi (%)	Suara Tdk Masuk /Golput (%)
1	Kota Kupang	252.128	116.709; (79,74)	51.076; (19,26)
2	Kab. Kupang	222.020	180.525; (81,31)	41.495; (18,74)
3	TTS	299.838	230.740; (76,95)	69.098; (23,05)
4	TTU	168.049	132.966; (79,12)	35.083; (20,88)
5	Belu	134.122	101.323; (75,55)	32.799; (24,45)
6	Alor	136.718	116.079; (84,90)	20.639; (15,10)
7	Flores Timur	164.513	134.267; (81,61)	30.246; (18,49)
No.	Kabupaten/Kota	Jumlah Pemilih	Suara Masuk /Partisipasi (%)	Suara Tdk Masuk /Golput (%)
8	Lembata	82.312	68.663; (83,42)	13.649; (16,58)
9	Sikka	197.823	171.330; (86,61)	26.493; (13,39)
10	Ende	168,266	147.946; (87,92)	20.320; (12,08)
11	Nagekeo	100.493	80.115; (79,72)	20.378; (20,28)
12	Ngada	107.427	84.545; (78,70)	22.882; (21,30)
13	Manggarai	209.839	167.140; (79,65)	42.699; (20,35)
14	Manggarai Barat	167.880	138.724; (82,63)	29.156; (17,37)
15	Manggarai Timur	199.335	151.326; (75,92)	48.009; (24,08)

16	Sumba Timur	167.712	131.696; (78,53)	36.016; (21,47)
17	Sumba Barat	79.319	61.166; (77,11)	18.153; (22,89)
18	Sumba Tengah	49.249	38.700; (78,58)	10.549; (21,42)
19	Sumba Barat Daya	225.200	174.495; (77,48)	50.705; (22,52)
20	Rote Ndao	88.853	71.335; (80,28)	17.518; (19,72)
21	Sabu Raijua	53.812	42.020; (78,09)	11.792; (21,91)
22	Malaka	122.361	92.310; (75,44)	30.051; (24,66)
Provinsi NTT		3.397.269	2.718.463; (80,01)	876.806; (19,99)

3. Pelanggaran Pemilu 2019.

Secara kuantitatif, pelanggaran yang terjadi sejak Tahap Pendaftaran Pemilih (DP4) hingga Tahap Pleno Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara (Pasca) Pemilu Serentak Tahun 2019 di Kabupaten/Kota se Provinsi Nusa Tenggara Timur berjumlah 87 kasus dengan rincian; Temuan oleh Bawaslu sebanyak 42 kasus dan Laporan Masyarakat sebanyak 45 kasus.

Khusus pelanggaran pada periode Pasca Pemilu 2019 (17 April 2019 hingga Pleno Rekapitulasi Penghitungan Suara) tercatat sebanyak 32 kasus dengan rincian yakni Temuan Bawaslu Provinsi dan Kabupaten / Kota sebanyak 19 kasus dan Laporan Masyarakat sebanyak 13 kasus. Dari 32 pelanggaran tersebut, 2 kasus diantaranya tidak diregistrasi sedangkan 30 kasus diregistrasi oleh Bawaslu dan setelah diverifikasi lebih lanjut, terdapat 14 kasus dinyatakan tidak memenuhi unsur-unsur pelanggaran sesuai ketentuan yang berlaku sehingga jumlah pelanggaran yang benar-benar memenuhi syarat formil maupun materil sebanyak 18 kasus dengan bentuk-bentuk pelanggaran sebagai berikut :

- Pelanggaran Administrasi sebanyak 1 kasus;
- Pelanggaran Kode Etik sebanyak 2 kasus;
- Pelanggaran Pidana sebanyak 13 kasus;
- Pelanggaran lainnya sebanyak 2 kasus.

Bawaslu Kabupaten/Kota se NTT telah memproses sebanyak 12 (dua belas) kasus pelanggaran Pidana Pemilu hingga putusan Pengadilan. Sedangkan penanganan pelanggaran Administrasi, Kode Etik dan pelanggaran lainnya dilakukan dengan mengeluarkan Rekomendasi

kepada penyelenggara Pemilu (KPU) seperti Pemungutan Suara Ulang (PSU), Pemungutan Suara Lanjutan (PSL), Penghitungan Suara Ulang di Tingkat TPS dan lain sebagainya. Kinerja Bawaslu Kabupaten/Kota yang merekomendasikan kepada KPU di daerah untuk melaksanakan PSU dan PSL adalah bukti profesionalisme yang patut diberi apresiasi.

4. Pleno rekapitulasi penghitungan perolehan suara di Kabupaten/Kota. Data hasil perolehan suara untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden mencatat bahwa Calon Presiden dan Wakil Presiden Nomor Urut 01 (Ir. Joko Widodo dan Prof. Ma'ruf Amin) masih mendominasi perolehan suara di Kabupaten / Kota se NTT.

2.1.4.3 Sosialisasi Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum

- Terlaksananya Sosialisasi UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum di Kabupaten Timor Tengah Selatan, pada tanggal 28 Februari 2019, di Aula Kantor Lurah Tufneno Kecamatan Kota SoE, Kabupaten TTS, dibuka oleh Asisten Pemerintahan Umum dan Kesra Sekda Kabupaten TTS atas nama Gubernur NTT.
- Terlaksananya Sosialisasi UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum di Aula Sekda Kabupaten Flores Timur Kabupaten Flores Timur, pada tanggal 12 Maret 2019, dibuka oleh Asisten Pemerintahan Umum dan Kesra Sekda Kabupaten Flores Timur atas nama Gubernur NTT.
- Terlaksananya Sosialisasi UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum di Aula BKD Kabupaten Sumba Barat Daya, pada tanggal 22 Maret 2019, dibuka oleh Kepala Badan Kesbangpol Kabupaten Sumba Barat Daya atas nama Gubernur NTT.
- Terlaksananya Sosialisasi UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum di Aula Hotel Pelangi-Borong Kabupaten Manggarai Timur, pada tanggal 25 Maret 2019, dibuka oleh Bupati Manggarai Timur, atas nama Gubernur NTT dihadiri pula oleh Wakil Bupati Manggarai Timur.

Peserta dari masing-masing kabupaten berjumlah 40 orang yang terdiri dari: Partai Politik, Organisasi Kemasyarakatan/LSM, Tokoh Masyarakat, Aparatur Badan Kesbangpol, KPU Kabupaten, Panwaslu Kabupaten, Camat, Lurah/Kepala Desa dan Pemilih Pemula (Pelajar

tingkat SLTA), Instansi Terkait Lingkup Pemerintah Kabupaten. Hasilnya adalah :

- Tersosialisasinya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu dan adanya pemahaman bagi 160 orang perwakilan peserta dari Kabupaten TTS, Flotim, SBD dan Kabupaten Manggarai Timur tentang Pemilu.

2.1.4.4 Kegiatan Verifikasi Bantuan Keuangan Partai Politik.

1). Terlaksananya Rapat Tim Bantuan Keuangan Parpol Verifikasi Data Kelembagaan Parpol masing-masing :

- Penyerahan LPJ Bantuan Keuangan ParPol kepada BPK, pada hari Selasa, 29 Januari 2019, bertempat di Ruang Rapat Badan Kesbangpol Prov. NTT. Peserta terdiri atas : Tim 7, Badan Kesbangpol Prov.NTT, Parpol dan BPK. Hasilnya adalah : Diterimanya Laporan Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Parpol dari Partai Politik kepada BPK NTT.
- Rapat Tim Verifikasi Bantuan Keuangan ParPol pada tanggal 14 Maret 2019, bertempat di Ruang Rapat Badan Kesbangpol Prov. NTT. Peserta terdiri atas : Tim 7 dan Badan Kesbangpol Prov.NTT. Hasilnya adalah : Terverifikasinya administrasi pencairan bantuan keuangan parpol, untuk selanjutnya disampaikan permohonan persetujuan pencairan oleh Gubernur yang akan ditindak lanjuti oleh Badan Kuangan Daerah Provinsi NTT.
- Rapat Tim Verifikasi Triwulanan pada tanggal 11 Juni 2019, bertempat di Ruang Rapat Badan Kesbangpol Prov. NTT. Peserta rapat berjumlah 25 orang terdiri atas : Tim 7 dan Badan Kesbangpol Prov.NTT. Hasilnya adalah : 1). Terevaluasinya LHP BPK perwakilan NTT dan adanya peningkatan terhadap kepatuhan dalam mempertanggungjawabkan Penerimaan dan Pengeluaran Bantuan Keuangan Parpol dengan Predikat telah “Memadai” dari 2 (dua) Parpol di T.A 2017 menjadi 5 (lima) Parpol di T.A 2018 yaitu : Partai GOLKAR, Partai NASDEM, Partai PAN, Partai HANURA, Partai PKS. 2). Terealisasinya bantuan Keuangan Parpol tahap I kepada 10 (sepuluh) Parpol hasil Pemilu 2014 melalui Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT. 3). Adanya Surat Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Nomor : BKP.B.200/63/Pol/10/2019, tanggal 16 September 2019 perihal Pengajuan Bantuan Keuangan Partai Politik Tahun 2019 untuk pencairan tahap II hasil Pemilu 2019.

- Rapat Tim Verifikasi Triwulan pada tanggal 30 September 2019, bertempat di Ruang Rapat Badan Kesbangpol Provinsi NTT. Peserta terdiri dari Tim 7, Badan Kesbangpol Provinsi NTT dan Parpol. Hasilnya adalah : Adanya komitmen Parpol bahwa Laporan Pertanggungjawaban bantuan keuangan Parpol disampaikan sesuai ketentuan dan tepat waktu yaitu pada bulan Januari tahun berjalan.

2). Pelaksanaan perjalanan dinas Hasil penilaian dan hasil kajian Bantuan Keuangan Partai Politik Kab/Kota dan Provinsi.

Tersedianya dokumen penilaian dan hasil kajian Bantuan Keuangan Partai Politik

Kabupaten/Kota dan Provinsi. Waktu pelaksanaan Bulan Pebruari s/d November.

Hasilnya adalah :

- 9 (Sembilan) Kabupaten/Kota yaitu Kota Kupang, Kabupaten Kupang, Malaka, Flores Timur, Lembata, Sikka, Ngada, Manggarai dan Sumba Barat Daya sebagai representase dari 22 Kabupaten dan Kota se NTT menunjukkan adanya peningkatan peran dan fungsi parpol di daerah. Hal ini terlihat dari penilaian dan pengkajian bantuan keuangan kepada partai politik yang telah di berikan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota yang kesemuanya dapat dimanfaatkan dengan baik dan benar penggunaan dana bantuan keuangan partai politik.
- Bantuan Keuangan kepada Parpol Tingkat Provinsi dan Kabupaten/ Kota yang mendapatkan kursi di DPRD Provinsi NTT diproses sesuai mekanisme dan prosedur yang berlaku.
- Peran Parpol untuk mewujudkan pengelolaan keuangan yang bersih, transparan, dan akuntabel adalah Parpol itu sendiri. Parpol perlu mempunyai pemahaman yang memadai tentang bagaimana pengelolaan dana bantuan bagi parpol.
- Realisasi bantuan keuangan partai politik Provinsi dan Kabupaten/Kota adalah sebagai berikut :

NO	PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA	NILAI PER SUARA SEBELUM BERLAKU PP NO.1 THN 2018	NILAI PER SUARA SESUDAH BERLAKU PP NO 1 THN 2018	JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITKI YANG MENDAPAT KURSI PEMILU 2004-2019	JUMLAH BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK (APBD 2019)

1	Nusa Tenggara Timur	Rp. 559,81.	Rp. 1.200	2.018.501.	Rp. 2.422.201,200.-
2	Sabu Raijua	Rp. 11.778.	Rp. 13.278	33.961.	Rp. 600.000.000.-
3	Sumba Timur	Rp. 8.281,291.	Rp. 8.281,291	102.641.	Rp. 850.000.000.-
4	Sumba Tengah	Rp. 13.387.	Rp. 13.387.	29.879.	Rp. 399.989.900.-
5	Sumba Barat	Rp. 15.652.	Rp. 15.652.	44.722.	Rp. 699.988.740.-
6	Sumba Barat Daya	Rp. 7.094.	Rp. 7.094.	160.388	Rp. 1.137.792.900.-
7	Flores Timur	Rp. 4.713.	Rp. 4.713.	112.527.	Rp. 530.339.751.-
8	Ende	Rp. 8.271.	Rp. 8.271.	85.673.	Rp. 708.650.773.-
9	Sikka	Rp. 4.829.	Rp. 1.500.	148.146.	Rp. 715.397.577.-
10	Kota Kupang	Rp. 4.464.	Rp. 4.464.	167.069.	Rp. 745.796.016.-
11	Nagekeo	Rp. 10.300.	Rp. 10.300.	69.754.	Rp. 718.466.200.-
12	Manggarai Barat	Rp. 5.621.	Rp. 5.621.	121.071.	Rp. 680.540.091.-
13	Manggarai Timur	Rp. 4.120.	Rp. 4.120.	125.827.	Rp. 518.407.240.-
14	Rote Ndao	Rp. 9.327.	Rp. 9.327.	60.642.	Rp. 565.607.934.-
15	Kupang	Rp. 4.900.	Rp. 4.900.	144.646.	Rp. 708.765.400.-
16	Timor Tengah Selatan	Rp. 2.969.	Rp. 1.500.	197.151.	Rp. 295.726.500.-
17	Timor Tengah Utara	Rp. 5.806.	Rp. 5.806.	114.016.	Rp. 661.978.000.-
18	Belu	Rp. 5.666.	Rp. 5.666.	85.548.	Rp. 484.714.968.-
19	Alor	Rp. 4.992.	Rp. 4.992.	100.308.	Rp. 500.738.000.-
20	Malaka	Rp. 5.666.	Rp. 5.666	79.191	Rp. 426.389.164.-
21	Ngada	Rp. 12.989,905	Rp. 12.989,905	64.545	Rp. 838.433.417.-
22	Manggarai	Rp. 4.120.	Rp. 4.120.	145.853.	Rp. 600.790.760.-
23	Lembata	Rp. 9.035	Rp. 9.035	59.039	Rp. 533.299.297.-

2.1.5 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Terpadu

Terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Terpadu Tahun 2019, di 14 Kabupaten/ Kota. Dengan hasil adalah 1). Pelaksanaan program dan kegiatan masih bersifat sektoral. 2). Sinkronisasi program dan kegiatan. 3). Penyesuaian Jadwal Pelaksanaan Kegiatan. 4). Semakin maraknya paham lain dan ujaran kebencian yang beredar di masyarakat melalui

media massa. 5). Kurangnya koordinasi dalam rangka pencegahan dan penanganan konflik sosial. 6). Data dan informasi masalah-masalah aktual di daerah masih bersifat parsial dan kondisional.

2.1.6 Kegiatan Koordinasi Peningkatan dan Pembinaan Ketahanan Seni, Budaya, Agama, Kemasyarakatan, dan Ekonomi.

- Terlaksananya Rapat Koordinasi Ketahanan Keagamaan pada hari Selasa, tanggal 30 April 2019, bertempat di Aula Rumah Bina Kerahiman Ilahi Ende, dengan Tema “Merekatkan Kebersamaan Hidup yang Rukun Dalam Mendukung Pembangunan di Provinsi Nusa Tenggara Timur”. Adapun peserta kegiatan berjumlah 90 (Sembilan puluh) orang terdiri dari Kaban/Kakan Kesbangpol Kabupaten/Kota se Provinsi Nusa Tenggara Timur, FKUB Tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Provinsi NTT. Hasilnya adalah dikeluarkannya Surat Gubernur NTT kepada Walikota Kupang dan Para Bupati se NTT Nomor : BU.450/08/BKBP/2019 tanggal 8 Mei 2019 perihal Penyampaian Hasil Rakor untuk ditindak lanjuti yaitu :
 - Badan Kesbangpol memiliki posisi yang strategis karena selain mengawal urusan pemerintahan umum (4 konsensus Nasional, Politik dan Demokrasi, Ketentraman, ketertiban dan kewaspadaan Nasional, ketahanan seni, budaya, agama, kemasyarakatan dan ekonomi), sekaligus menjadi mata dan telinga bagi pemerintah daerah untuk menyiapkan berbagai aspek pra kondisi yang bersifat non fisik sebagai prasyarat utama bagi pelaksanaan pembangunan yang bersifat fisik, maka peran dan fungsi Badan Kesbangpol perlu mendapat perhatian.
 - FKUB adalah mitra pemerintah dalam menjaga dan memelihara kerukunan umat beragama, maka perlu mendapat perhatian khususnya dalam hal penguatan kelembagaan, fungsi dan tugas forum dimaksud.
 - Perlu adanya sinergitas program dan kegiatan Badan Kesbangpol Kabupaten/Kota dengan Badan Kesbangpol Provinsi.
 - Perlu adanya sinergitas program dan kegiatan FKUB Kabupaten/Kota se NTT dengan FKUB Provinsi.

- Terlaksananya Rapat Koordinasi Ketahanan Ekonomi pada tanggal 15 Oktober 2019 bertempat di Aula Kantor Badan Kesbangpol Provinsi NTT. Adapun peserta kegiatan berjumlah 90 (Sembilan puluh) orang terdiri dari: UMKM, Bappeda, Dinas Koperasi dan UKM, Dinas Perindustrian, Dinas Sosial, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Hasilnya adalah adanya rekomendasi :
 - Pembentukan Pokja ketahanan ekonomi untuk membuat RAN Aksi, pemantauan, data evaluasi (kolaborasi dengan beberapa tim yang sudah dibentuk).
 - Sasaran : Lokasi usaha tambak garam yang berfokus pada Desa Nunkurus, Kec. Kupang Timur, Kab. Kupang (kolaborasi dengan biro ekonomi); Lokasi destinasi wisata (pilot project mengukur kontribusi pariwisata terhadap PDRB); Cluster komoditi usaha ekonomi cabe rawit dan ayam potong; Kolaborasi antara pihak swasta, Pemda dan masyarakat.
 - Penetapan kawasan dalam pengembangan ekonomi kreatif Sasaran : Skala Kecil : Kuliner, dll. Skala Besar : Kolaborasi kegiatan dengan 22 Desa/Kelurahan model yang telah ditetapkan oleh Ketua Tim PKK Provinsi NTT di 22 Kab/Kota se NTT.
 - Pemerintah daerah memfasilitasi pengadaan sarana dan prasarana dengan prioritas infrastruktur ke daerah-daerah destinasi wisata dan atau daerah potensi pengembangan Sumber Daya Alam.
 - BI, OJK, dan dinas Kopnakertrans bekerja sama memfasilitasi SKIM kredit kepada pelaku UMKM.
 - Lembaga perguruan tinggi memberikan konsep pengembangan ekonomi kreatif melalui hasil penelitian.
 - Mengundang investor untuk pendampingan financing di luar APBD.
- Terlaksananya kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pengambilan data Ormas/LSM di 10 Kabupaten/Kota yaitu : Kota Kupang, Kabupaten Kupang, TTS, TTU, Belu, Alor, Flores Timur, Sikka, Manggarai, Manggarai Barat dengan hasil adalah :
 - Kabupaten Manggarai Barat : 19 Ormas/ LSM yang diusulkan terdapat 9 yang sudah mendapat nomor SKT, 10 masih dalam tahap verifikasi.
 - Kabupaten Alor : 11 Ormas/ LSM yang mengusulkan, 11 sudah mendapat nomor SKT.
 - Kabupaten Manggarai : 8 Ormas/LSM yang mengusulkan, 8 sudah mendapat nomor SKT.

- Kota Kupang : 23 Ormas/LSM yang mengusulkan, 23 belum mendapat nomor SKT.
- Kabupaten Flores Timur : 56 Ormas/LSM yang mendaftar, 56 yang belum mendapat nomor SKT .
- Kabupaten Kupang : 36 Ormas/LSM yang mendaftar, 36 belum mendapat nomor SKT.
- Kabupaten TTS : 35 Ormas/LSM yang mendaftar, 35 belum mendapat nomor SKT.
- Kabupaten Belu : 80 Ormas/LSM yang mendaftar, 15 yang telah mendapat nomor SKT.
- Kabupaten TTU : 23 Ormas/LSM yang mendaftar, 20 yang telah mendapat nomor SKT.

2.1.7 Kegiatan Peningkatan Kewaspadaan Nasional

- Terlaksananya Rapat Terpadu Penanganan Gangguan Konflik sosial Kabupaten/Kota dan Tk. Provinsi di Aula Fernandez Kantor Gubernur NTT pada tanggal 11 April 2019, peserta kegiatan berjumlah 71 (Tujuh Puluh Satu) orang terdiri dari: FORKOPIMDA NTT, BINDA NTT, Forum-forum tingkat Provinsi NTT (FPK, FKUB, FKDM), Pimpinan Agama, OPD terkait tingkat Provinsi NTT, BUMN (PLN, Telkom dan Pertamina), serta Kepala Badan/Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten/Kota Se-Nusa Tenggara Timur. Hasilnya adalah terinventarisasinya masalah-masalah Pemilu dan langkah solusi serta kesiapan penyelenggaraan Pemilu dan dukungan pemerintah daerah, TNI/POLRI serta instansi terkait sebagai berikut :
 - Menjelang penyelenggaraan Pemilu 17 April 2019, Nusa Tenggara Timur (NTT) masih kekurangan 808.459 surat suara. Pergantian terhadap surat suara Pemilu 2019 yang rusak, dilakukan distribusi mulai pada Sabtu (13/4/2019) atau **H-4** Pemilu .
 - Dari isu dan perkiraan potensi konflik dalam pelaksanaan Pemilu 2019, POLRI telah menetapkan zone disetiap daerah yang menjadi konsentrasi pengamanan. Hasil Pemantauan secara umum situasi pelaksanaan Pemilu aman, tidak ada Ancaman, Tantangan, Hambatan, Gangguan (ATHG). Petugas TNI / POLRI siap mengamankan jalannya momentum Pemilu Serentak tahun 2019 diseluruh Wilayah Nusa Tenggara Timur. Pemda berkewajiban melakukan pencegahan dan penanganan konflik sosial dengan

pembentukan Satgas Penanganan Konflik. TNI siap membantu Kepolisian mengamankan jalannya pemilu serentak 2019.

- Posisi strategis KPU sebagai penyelenggara pemilu yang mengendalikan keseluruhan tahapan terutama berkaitan dengan logistik, penghitungan suara serta pleno rekapitulasi hasil. KPU juga harus menyediakan skema penyelesaian masalah terkait problem yang mungkin akan terjadi.
- Bawaslu dalam menegakkan pengawasan pemilu hendaknya dijalankan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- Pendampingan bagi pemilih disabilitas dilaksanakan berdasarkan pasal 43 PKPU nomor 3 tahun 2019. Ada 4 (empat) pendampingan yang dilakukan KPU yaitu Tuna Daksa, Tuna Rungu, Lanjut Usia dan Sakit Parkinson.
- Penyelenggara Pemilu tingkat KPPS, PPS, PPK harus bertindak netral dan profesional.
- BMKG siap memberikan informasi anomali cuaca tiap hari melalui media yang telah disediakan.
- PLN, Telkom, dan Pertamina siap terkait dengan ketersediaan jaringan listrik, internet, dan stok BBM pada saat hari H dan pasca pemilu.
- Para Pimpinan Agama menyampaikan himbauan, seruan, ajakan, kepada umat agar dapat menggunakan hak pilihnya secara bertanggungjawab pada saat pra, hari H, dan pasca Pemilu.
- Terlaksananya Rapat Terpadu Penanganan Konflik Sosial Tingkat Provinsi, pada hari Jumat, 5 April 2019, bertempat di Aula Badan Kesbangpol Provinsi NTT. Peserta 30 orang terdiri dari Badan Kesbangpol Provinsi NTT, Polda NTT, Korem 161 WS Kupang, Badan Intellegan Daerah Provinsi NTT, Lanud El Tari Kupang, Intel Lantamal VII Kupang, Kanwil Agama NTT, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTT, Dinas Perindag Provinsi NTT, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTT, Dinas Kominfo Provinsi NTT, Dinas Koperasi dan Nakertrans Provinsi NTT, Biro Pemerintahan Prov.NTT, Badan PSDMD Provinsi NTT, Badan Pertanahan Nasional Provinsi NTT, BP3TKI Kupang, Kanwil PPTP Kementerian Pertahanan NTT. Hasil rapat adalah :
 - Data Pelaporan Rencana Aksi Penanganan Konflik Sosial Tingkat Provinsi NTT untuk periode Januari s/d April 2019 (B.04) oleh setiap

OPD dan instansi terkait diserahkan sebelum tanggal 05 Mei 2019 beserta data pendukungnya.

- Penyampaian dokumen Rencana Aksi Penanganan Konflik Sosial Tingkat Provinsi sebagai berikut :
 - Aktivitas Pertemuan sosialisasi, penyuluhan, rapat; dokumennya berupa Notulensi, Daftar hadir, Foto kegiatan, Materi
 - Aktivitas pertemuan seperti dialog, talkshow, atau kegiatan lainnya melalui media TV atau radio; dokumennya berupa foto/video pada saat kegiatan tersebut berlangsung.
 - Penerbitan izin, surat keputusan, peraturan, MOU/Nota Kesepakatan, pelaporan data kasus konflik, dan lain-lain; dokumennya telah ditandatangani pejabat terkait.
 - Kegiatan Lapangan, dalam bentuk simulasi, pemantauan /pengawasan, penghentian konflik, dan lain-lain; dokumennya berupa foto atau materi (data hasil kegiatan lapangan).
- Terlaksananya Rapat Terpadu Penanganan Konflik Sosial Tingkat Provinsi (B08), pada hari Selasa, 6 Agustus 2019, bertempat di Aula Badan Kesbangpol Provinsi NTT- Kota Kupang. Peserta 30 orang yang terdiri dari Badan Kesbangpol Provinsi NTT, Polda NTT, Korem 161 WS Kupang, Badan Intelgen Daerah Provinsi NTT, Lanud El Tari Kupang, Intel Lantamal VII Kupang, Kanwil Agama NTT, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTT, Dinas Perindag Provinsi NTT, Dinas Koperasi dan Nakertrnas Provinsi NTT, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Badan PSDMD Provinsi NTT, BP3TKI Kupang. Hasil rapat adalah :
 - Terinformasinya Hasil Evaluasi Sekretariat Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial Tingkat Nasional tanggal 11 Juli 2019 di Makasar sebagai berikut :

DAFTAR PERINGKAT HASIL EVALUASI LAPORAN RENCANA AKSI
TARGET B.04 TAHUN 2019 WILAYAH TIMUR

NO	PROVINSI	PERINGKAT	CAPAIAN (%)
1.	Nusa Tenggara Timur	1	87.05%
2.	Maluku Utara	2	85.79%
3.	Kalimantan Selatan	3	81.31%
4.	Papua Barat	4	81.17%
5.	Bali	5	74.89%
6.	Kalimantan Tengah	6	74.25%
7.	Kalimantan Timur	7	73.25%
8.	Gorontalo	8	71.4%
9.	Sulawesi Tengah	9	64.33%
10.	Sulawesi Selatan	10	62.93%

11.	Sulawesi Utara	11	55%
12.	Nusa Tenggara Barat	12	48.23%
13.	Kalimantan Utara	13	46.66%
14.	Sulawesi Barat	14	44.93%
15.	Kalimantan Barat	15	38.94%
16.	Sulawesi Tenggara	16	22.33%
17.	Maluku	17	16%
18.	Papua	18	0.0%

- Terlaksana Rapat Terpadu Penanganan Konflik Sosial Tingkat Provinsi (B12),
 pada hari Kamis, tanggal 5 Desember 2019, bertempat di Aula Badan Kesbangpol Provinsi NTT. Peserta 30 orang yang terdiri dari Kanwil Agama NTT, Kanwil KumHam Provinsi NTT, Dinas Perindag Provinsi NTT, Dinas Koperasi dan Nakertrnas Provinsi NTT, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Badan PSDMD Provinsi NTT, BP3TKI Kupang. Hasilnya adalah :
 - Adanya komitmen OPD dan Instansi terkait untuk segera melaporkan Rencana Aksi B.12 Tahun 2019, sebelum tanggal 15 Desember 2019.
 - Tersusunnya Rencana Aksi Penanganan Konflik Sosial Tahun 2020 sebanyak 19 (Sembilan belas) Rencana Aksi, terdapat 4 (empat) Rencana Aksi baru.
- Terlaksananya Bimtek / TOT Community Policing, pada hari Selasa dan Rabu, tanggal 8 dan 9 Oktober 2019, bertempat di Aula Hotel Swiss Bell Kristal di Kota Kupang. Peserta kegiatan sebanyak 40 orang terdiri dari Babinkamtibmas, ASN Badan Kesbangpol Kota Kupang, Lurah, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, Tokoh Pemuda. Hasilnya 1). Meningkatkan kesiapsiagaan dan keterlibatan secara aktif seluruh instansi terkait untuk menjaga ketertiban umum dan ketentraman masyarakat. 2). Meningkatkan peran forum-forum kemitraan masyarakat seperti FKDM, FKUB, dan FPK serta Ormas lainnya dalam rangka deteksi dini, cegah dini, dan penyelesaian potensi gangguan trantibum. 3). Mengaktifkan kembali Siskamling melalui ronda serta mengaktifkan wajib lapor (1 x 24 jam) bagi tamu pendatang.
- Terlaksananya Penyuluhan Pencegahan Penyebaran Paham Radikalisme dan Aksi Terorisme: 1) Di Kabupaten Belu, pada hari Rabu, tanggal 28 Agustus 2019, bertempat di Aula Hotel Nusantara II Atambua; 2) Di Kabupaten Sikka, pada hari Rabu, tanggal 17 September 2019, bertempat di Aula Heinrich Maumere. Adapun peserta kegiatan masing-

masing kabupaten berjumlah 90 (Sembilan Puluh) orang, terdiri dari Siswa/I SMU, Mahasiswa/I, Aparatur Kesbangpol Kabupaten. Hasilnya adalah :

- Terbangunnya kebersamaan dan semangat yang nyata diantara seluruh peserta dalam rangka menyatukan langkah, tekad, pikiran dalam mewujudkan iklim yang kondusif bagi terselenggaranya kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kemasyarakatan di daerah;
- Menolak dengan tegas segala bentuk ketidakadilan, paham, dan tindakan kaum Radikalisme yang menggunakan kekerasan dan Terorisme di Wilayah Nusa Tenggara Timur, khususnya Kabupaten;
- Terbangunnya pemahaman tentang Wawasan Kebangsaan;
- Terbangunnya komitmen sinergitas dengan semua pihak secara berkesinambungan untuk mencegah berkembangnya paham Radikalisme dan Aksi Terorisme dengan cara mendata semua warga baru dan menanyakan identitas mereka.
- Terlaksananya Rapat Penanganan Gangguan Konflik Sosial di Kabupaten TTU pada hari Selasa, tanggal 2 Juli 2019, bertempat di Aula Hotel Litani Kefamenanu. Peserta berjumlah 50 orang yang terdiri dari unsur TNI, Forum-Forum (FKDM, FKUB, FPT), Kecamatan/Kelurahan, Ormas, Tokoh Masyarakat, Tokoh Pemuda, Tokoh Perempuan, Tokoh Agama. Hasilnya adalah :
 - Terbangunnya pemahaman pentingnya kerjasama diantara peserta secara berkesinambungan dalam melakukan deteksi dini, cegah dini, lapor cepat terhadap potensi ancaman timbulnya konflik sosial di daerah;
 - Adanya komitmen untuk memaksimalkan peran RT, RW, Lurah/Kepala Desa, Camat dalam melaporkan setiap kedatangan orang baru di wilayahnya 1 x 24 jam sebagai upaya bersama mengkoordinasikan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum.
 - Pentingnya mulai melakukan hal yang paling kecil yaitu menjaga keluarga dengan cara memberi pengarahan dan penjelasan, peduli terhadap lingkungan dimana kita tinggal dan bila melihat sesuatu yang mencurigakan langsung melaporkan kepada pihak yang berwajib dan yang terakhir selalu melakukan komunikasi yang baik antar warga.

- Terlaksananya Rapat Penanganan Gangguan Konflik Sosial di Kabupaten Lembata, pada hari Selasa, tanggal 17 September 2019, bertempat di Aula Hotel Palm Indah Lewoleba. Peserta berjumlah 50 orang yang terdiri dari Unsur TNI, POLRI, Forum Kerukunan Umat beragama (FKUB), Camat, Lurah, Ormas, tokoh Pemuda, Tokoh Perempuan, Tokoh Agama, ASN Badan Kesbangpol. Hasilnya adalah adanya komitmen :
 - Membangun kebersamaan dan semangat yang nyata diantara seluruh pemangku kepentingan dalam rangka menyatukan langkah, tekad, pikiran dan pemahaman yang sama dalam mewujudkan iklim yang kondusif bagi terselenggaranya kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan di daerah.
 - Melakukan kerjasama dengan tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh agama, tokoh pemuda secara berkesinambungan agar dapat melakukan deteksi dini, cegah dini, lapor cepat terhadap potensi ancaman timbulnya konflik sosial di daerah.
 - Pembentukan Forum-Forum (FKDM, FPK, FKUB) sampai ke tingkat Kecamatan.
 - Pemerintah Daerah bersama aparat keamanan akan terus melakukan pemantauan terhadap seluruh aktivitas warga masyarakat eks gafatar agar tidak mempengaruhi masyarakat lainnya untuk mengikuti ajaran dan paham yang bertentangan dengan ideologi pancasila,
- Terlaksananya Rapat Penanganan Gangguan Konflik Sosial Tingkat Provinsi NTT di Kabupaten Manggarai pada tanggal 14 November 2019, bertempat di Aula Effata St. Aloysius Ruteng. Peserta berjumlah 50 orang yang terdiri dari unsur Satpol PP, Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan, Mahasiswa, Tokoh Masyarakat. Hasilnya adalah adanya konsep pendekatan yang kondisional (seperti pendekatan prosperity, dan lain-lain) dalam menyelesaikan masalah sengketa tanah dan keterlibatan pihak-pihak yang menjadi panutan serta memahami silsilah tanah tersebut.
- Terlaksananya Sosialisasi Perda tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.

No	Kabupaten	Tanggal	Lokasi Kegiatan
----	-----------	---------	-----------------

1	Sabu Raijua	17 Oktober 2019	Aula Setda Kab. Sabu Raijua.
2	Ngada	17 Oktober 2019	Aula Gracia Cafe Kota Bajawa
3	Nagekeo	17 Oktober 2019	Aula Hotel Sinar Kasih Mbai
4	Rote Ndao	17 Oktober 2019	Aula ELSAIDAI
5	Alor	17 Oktober 2019	Aula Kantor Koperasi Citra Hidup Tribuana
6	Manggarai	17 Oktober 2019	Aula St.Yoseph Effata Ruteng
7	TTU	17 Oktober 2019	Aula Restoran Litani.
8	Lembata	21 Oktober 2019	Aula SMK Don Bosco Lembata.
9	Sumba Timur	29 Oktober 2019	Aula Gedung Nasional Waingapu.
10	Sumba Tengah	28 Oktober 2019	Aula SMA Kristen Waibakul
11	Sumba Barat	28 Oktober 2019	Aula Wisma Manda Elu
12	TTS	29 Oktober 2019	Aula Hotel Dena Soe
13	Sumba Barat Daya	30 Oktober 2019	Aula SMAK St. Alfonsus Wetebullu
14	Belu.	19 November 2019	Aula Hotel Bahagia II
15	Malaka	19 November 2019	Aula Hotel Ramayana
16	Flores Timur	21 November 2019	Aula Dinas Koperasi
17	Ende	18 November 2019	Aula Susteran Emaus
18	Mangarai Barat.	26 November 2019	Aula Rumah Singgah SSPS Labuan Bajo/Biara St. Avila
19	Sikka	21 November 2019	Aula FKUB Kabupaten Sikka
20	Mangarai Timur	21 November 2019	Aula Hotel Embun Pagi Borong

Peserta dari masing-masing Kabupaten sebanyak 60 (enam puluh) orang yang terdiri dari Siswa SMU/ SMK, Tokoh Pemuda/I, Wartawan, Pemuda Gereja, Pemuda Mesjid, Tokoh Masyarakat. Hasilnya adalah :

- Tersosialisasinya Perda Provinsi NTT Nomor 8 Tahun 2019 tentang Fasilitas Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.
- Adanya masukan untuk penyusunan juklak/juknis dari Perda.
- Adanya pemahaman tentang bahaya Narkotika.

2.1.8 Peningkatan Kerjasama Penanganan Aktivitas Orang Asing dan Lembaga Asing.

- Terselenggaranya kegiatan Rapat Penanganan Orang Asing dan Lembaga Asing (4 kali) Tingkat Provinsi di Kota Kupang , yaitu :
 - I. Pada hari Selasa, tanggal 7 Mei 2019, bertempat di Aula Badan Kesbangpol Provinsi NTT. Peserta 25 orang yang terdiri dari anggota Tim Koordinasi Pemantauan Orang Asing Tingkat Provinsi NTT. Hasilnya adalah :
 - Semua anggota Tim Koordinasi melakukan peningkatan pemantauan terhadap keberadaan Orang Asing, NGO, Lembaga Asing dan Tenaga Kerja Asing sesuai dengan Tusi masing-masing; namun dalam melakukan pemantauan harus saling bersinergi diantara anggota tim;
 - Masing-masing anggota Tim saling memberi informasi data yang valid dan terkini serta dilaporkan ke Dinas Kominfo Provinsi untuk dijadikan NTT satu Data.
 - II. Pada hari Selasa, tanggal 6 Agustus 2019, bertempat di Aula Badan Kesbangpol Provinsi NTT. Peserta 25 orang yang terdiri dari anggota Tim Koordinasi Pemantauan Orang Asing Tingkat Provinsi NTT, hasilnya adalah :
 - Tim Koordinasi perlu melakukan pemantauan dan pengawasan serta koordinasi berlanjut terhadap : 1) 4 (empat) Warga Negara Asing asal Jerman yang melakukan syuting film tentang penutupan sementara Taman Nasional Komodo dari kunjungan wisatawan di Labuan Bajo.
 - 2). Bakti Sosial berupa operasi mata gratis yang dilakukan oleh Tenaga Kesehatan Warga Negara Asing asal Polandia dan Taiwan di Kabupaten Sumba Barat, sehingga pelaksanaannya tidak bertentangan dengan ijin yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia; 3). Tenaga Kerja Asing khususnya Rohaniawan Islam (Jemaah Tablic) dan Kristen Protestan. 4). Pengungsi Luar Negeri di Kota Kupang berjumlah : 236 orang, dengan rincian : Hotel Kupang INN 73 orang, Hotel Ina Boy 69 orang, Hotel Lavender 92 orang, Rudenim 2 (Imigratoir) orang. Imigratoir berasal dari Negara Bangladesh dan Amerika Serikat, mereka tidak memiliki

dokumen dan menunggu untuk dideportasi kembali ke Negara asalnya.

III. Pada hari Selasa, tanggal 8 Oktober 2019, bertempat di Aula Badan Kesbangpol Provinsi NTT. Peserta 25 orang yang terdiri dari anggota Tim Koordinasi Pemantauan Orang Asing Tingkat Provinsi NTT. Hasilnya adalah :

- Tim Koordinasi perlu melakukan pemantauan dan pengawasan serta koordinasi berlanjut terhadap : 1) Warga Negara Asing yang melakukan syuting film Taman Nasional Komodo Labuan Bajo Kabupaten Manggarai Barat, Kabupaten Ende maupun Kabupaten Sumba Barat. 2) Orang asing baik yang melakukan kunjungan wisatawan maupun yang melakukan Bakti Sosial. 3). 13 Warga Negara India di Kabupaten Kupang dan 8 Warga Negara Amerika di Kabupaten Belu. 4) Orang Asing baik wisatawan asing maupun Tenaga Kerja Asing yang over stay, untuk segera dideportasi ke Negara asalnya.
- Perlunya masyarakat juga ikut menjaga keamanan dan kenyamanan bagi semua Orang Asing yang berkunjung ke Wilayah Provinsi NTT;
- Penegasan kepada Bupati/Walikota untuk melakukan pengawasan terhadap keberadaan orang asing sampai ke tingkat RT/RW;

IV. Pada hari Kamis tanggal 28 November 2019, bertempat di Aula Badan Kesbangpol Provinsi Nusa Tenggara Timur. Peserta 25 orang yang terdiri dari anggota Tim Koordinasi Pemantauan Orang Asing Tingkat Provinsi NTT. Hasilnya adalah :

- Untuk memaksimalkan Tugas dan Fungsi Tim Koordinasi, maka perlu dilakukan restrukturisasi keanggotaan;
- Tim koordinasi perlu melakukan Rencana Aksi berupa operasi gabungan bersama baik terhadap Orang Asing, NGO, Lembaga Asing dan Tenaga Kerja Asing, maupun kapal-kapal asing yang masuk;
- Tim koordinasi melalui Badan Kesbangpol perlu melakukan koordinasi dengan Pemerintah Kota Kupang dan sekolah terkait dan memastikan anak-anak pengungsi luar negeri yang bersekolah di pendidikan formal, apabila tamat tidak diberikan ijazah, hanya boleh diberikan surat keterangan lulus; Telah ditindak lanjuti dengan surat Kepala Badan Kesbangpol Provinsi

NTT Nomor : BKBP.300/63/KN/52/2019 tanggal 19 Desember 2019 kepada Kepala Badan Kesbangpol Kota Kupang.

- Tim koordinasi perlu meningkatkan koordinasinya sehubungan masih ditemukan adanya orang asing yang ijin tinggalnya melebihi batas waktu (*overstay*)
 - Tim koordinasi melalui Rudenim perlu memastikan bahwa dengan ditutupnya Kantor UNHCR di Kupang, tidak menyulitkan dalam penetapan pengungsi atau pencari suaka ketika hendak ditempatkan ke Negara ke tiga.
 - Dari hasil evaluasi selama tahun 2019, ditemukan warga Negara asing yang melakukan bakti sosial berupa pengobatan gratis maupun sunatan massal di Kabupaten yang tidak memiliki ijin kegiatan. Oleh karena itu, diminta semua anggota tim sesuai dengan tupoksi di instansi/lembaga masing-masing terus meningkatkan koordinasi dan komunikasi dengan jejaring yang ada di Kabupaten/Kota agar terus berbagi informasi dalam rangka menjaga keamanan dan kenyamanan di wilayah Provinsi NTT.
- Terselenggaranya kegiatan Rapat koordinasi Penanganan Orang Asing Tk.Provinsi dan Kabupaten /Kota se-NTT, dilaksanakan pada hari Kamis, 20 Juni 2019, bertempat di Aula Hotel Pelangi Labuan Bajo - Kabupaten Manggarai Barat. Peserta 50 orang yang terdiri dari Badan Kesbangpol Provinsi dan Kabupaten/Kota se-NTT, Anggota Tim Koordinasi Pemantauan Orang Asing Kabupaten Manggarai Barat, Unsur TNI/Polri, Imigrasi, Kecamatan/Kelurahan, Tokoh Masyarakat, Tokoh Pemuda, Tokoh Perempuan, Tokoh Agama. Hasilnya adalah :
- Perkuat sinergi pelaksanaan pemantauan dan pengawasan melalui Pembentukan regulasi, Pembangunan system, sebelum regulasi terbentuk dan dibangun system, koordinasi dan sinergi pelaksanaan dilakukan melalui whatshap.
 - Peningkatan pelaksanaan pemantauan dan pengawasan melalui operasi terpadu.
 - Membuat langkah-langkah konkrit untuk pengawasan pergerakan orang asing melalui : Pembuatan zona, Himbauan tertib aktivitas orang asing menggunakan teknologi, Pelaksanaan pekan kewaspadaan dini masyarakat.

2.1.9 Peningkatan Kerjasama dengan Aparat Keamanan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan.

- Terselenggaranya kegiatan pengendalian keamanan dalam teknik pencegahan kejahatan, dilaksanakan pada tanggal 12 Pebruari 2019 di Gedung Nasional Waingapu-Kabupaten Sumba Timur. Tema : " Pencegahan dan pengendalian kejahatan saat menyongsong pelaksanaan PILEG dan PILPRES ". Peserta 110 orang yang terdiri dari Aparat Keamanan, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Tokoh Adat, Pemuda, Tokoh Perempuan, Lurah dan Camat. Hasilnya adalah :
 - Diperlukan adanya kontrol publik dalam menjamin penyelenggaraan pemilu yang berkualitas.
 - Membangun sinergitas bersama antara seluruh komponen terkait agar meningkatkan pemahaman tentang pemilu yang berkualitas.
 - Masyarakat harus berani melaporkan tindak kejahatan kepada pihak keamanan dalam proses pemilu yang dilakukan oleh penyelenggara.
 - Pemetaan titik titik rawan pemilu, kemudian dibahas bersama KOMINDA untuk dicarikan jalan keluar.

3 Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan, Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional.

Jumlah Pegawai Badan Kesatuan Bangsa dan Politik per 31 Desember 2019 sebanyak Empat Puluh Lima (45) Orang, dengan kualifikasi :

a. Tingkat Pendidikan :

- SLTP : 1 orang;
- SLTA : 10 orang;
- Diploma : - orang;
- Sarjana : 27 orang;
- Magister : 7 orang;

b. Pangkat/ Golongan :

- Golongan IV : 8 orang;
- Golongan III : 35 orang;
- Golongan II: 2 orang;
- Golongan I : - orang.

c. Pejabat Struktural :

Eselon II : 1 orang, Eselon III : 5 orang, Eselon IV : 11 orang.

d. Pejabat Fungsional Umum: orang

Arsiparis : 1 orang.

e. Daftar Pegawai menurut Pendidikan/Pangkat/Golongan/Jabatan

N0.	Uraian	Jumlah (Orang)
	SD	-
	SLTP	1 orang
	SLTA	10 orang
	Diploma	- Orang
	S1-Sarjana	27 orang
N0.	Uraian	Jumlah (Orang)
	S2-Magister	7 orang
2.	Menurut Jabatan	
	Eselon II	1 orang
	Eselon III	5 orang
	Eselon IV	11 orang
3.	Menurut Pangkat/Golongan:	
	IV-D	1 orang
	IV-C	- orang
	IV-b	6 orang
	IV-a	1 orang
	III-d	19 orang
	III-c	3 orang
	III-b	11 orang
	III-a	4 orang
	II-d	- orang
	II-c	2 orang
	II-b	- orang
	II-a	- orang

4. Alokasi dan Realisasi Anggaran.

Alokasi anggaran urusan Politik dan Dalam Negeri sebesar Rp. 7.792.398.000,- realisasi Rp.7.610.577.246 ,- atau 97.67 (%), terdiri dari Belanja Tidak langsung Rp. 4.668.271.000,- realisasi Rp. 4.680.345.151 ,- atau 100.26 (%), dan Belanja Langsung Rp.3.124.127.000,- realisasi sebesar Rp. 2.930.232.095,- atau 93.79 (%) dan sisa anggaran sebesar Rp.193.894.905,- termasuk dalam anggaran Belanja Langsung yaitu belanja SKPD sebesar Rp. 743.980.700,- realisasi sebesar Rp.713.922.015 ,- atau 95.95 (%) sisa anggaran Rp. 30.058.685 ,- dan belanja urusan Wajib Rp.2.380.146.300,- realisasi Rp.2.216.310.080 ,- atau 93.12 (%) sisa anggaran Rp. 163.836.220 ,-

N O	PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN DPPA (RP)	REALISASI	PROSENTAS E / %
--------	----------------------	--------------------	-----------	-----------------

	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	409.397.200	386.147.615	94.32
01	Penyediaan Jasa Surat menyurat	2.000.180	2.000.000.	99.99
02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	66.960.000	44.820.615	66.94
06	Penyediaan jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan dinas/operasional	31.440.000	31.440.000	100
07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	69.400.000	69.400.000	100
N O	PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN DPPA (RP)	REALISASI	PROSENTAS E / %
08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	23.753.900	23.753.900	100
10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	10.000.000	10.000.000	100
11	Penyediaan Barang Cetak dan Pengadaan	10.000.000	10.000.000	100
12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan bangunan kantor	8.992.000	8.992.000	100
15	Penyediaan bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1.990.000	1.990.000	100
17	Penyediaan Makan dan Minum	5.000.000	5.000.000	100
18	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	64.040.000	63.946.100	100
19	Penyediaan Jasa Pengangkutan Beras dan Barang Dinas	6.000.000	6.000.000	100
21	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas Dalam Daerah	70.000.000	69.996.500	100
49	Penyediaan Jasa Jaminan Sosial	4.821.120	3.823.200	79.30
50	Pendidikan dan Pelatihan Formal	25.000.000	24.986.200	99.94
52	Penyediaan Pameran Pembangunan	10.000.000	10.000.000	100 %
02	Program Peningkatan Sarana dan PraProgram Peningkatan sarana Aparatur	299.000.000	292.240.900	97.74
09	Pengadaan Meubelair	260.000.000	253.240.900	97.40
24	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	14.000.000	14.000.000	100

28	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	25.000.000	25.000.000	100
06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	35.583.500	35.533.500	99.86
01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	14.050.000	14.050.000	100
02	Penyusunan Laporan-laporan	7.483.500	7.483.500	100
03	Penyusunan Renstra	14.050.000	14.000.000	99.64
Jumlah Belanja SKPD		743.980.700	713.922.015	96.96
N O	PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN DPPA (RP)	REALISASI	PROSENTAS E / %
I	Program Pengelolaan Perbatasan, Pembinaan Politik Dan Perlindungan Masyarakat	2.380.146.300	2.216.310.080	93.12
01	Penguatan Pokja Indeks Demokrasi Indonesia Tingkat Provinsi	100.000.000	95.380.600	95.38
02	Peningkatan Wawasan Kebangsaan	361.608.000	322.700.330	89.24
03	Pembentukan dan Penguatan Kapasitas Forum-forum FKUB, FPK dan FKDM Provinsi NTT	339.800.000	338.664.700	99.67
04	Penyuluhan Peraturan Perundang-undangan Bidang Politik	392.703.000	377.231.750	96.06
05	Verifikasi Bantuan Keuangan Partai Politik	64.821.000	61.145.200	94.33
06	Monitoring, Pelaporan dan Evaluasi Terpadu Kesbangpol Kabupaten/Kota	52.700.000	51.485.400	97.70
07	Koordinasi Peningkatan dan Pembinaan Ketahanan Seni, Budaya, Agama, Kemasyarakatan dan Ekonomi.	118.836.300	100.890.900	84.90

08	Peningkatan Kewaspadaan Nasional.	770.128.000	707.770.700	91.90
09	Peningkatan Kerjasama Penanganan Aktivitas Orang Asing dan Lembaga Asing	133.250.000,	115.551.000	86.72
10	Peningkatan Kerjasama dengan Aparat Keamanan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan	46.300.000	45.489.500	98.25
Jumlah Belanja WAJIB		2.380.146.300	2.216.310.080	93.12
TOTAL (SKPD + WAJIB)		3.124.127.000	2.930.232.095	93.79

5 Kesesuaian Perencanaan Pembangunan Daerah

Usulan Renja untuk Tahun 2019 berbanding dengan Program dan Kegiatan Tahun 2019 adalah :

	Renja untuk Tahun 2019
No	Program dan Kegiatan
I	PROGRAM PENGELOLAAN PERBATASAN, PEMBINAAN POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
1	Orientasi Pemantapan Budaya Politik dan Stabilitas Politik
2	Penguatan Pokja Indeks Demokrasi Indonesia Tingkat Provinsi
3	Peningkatan Wawasan Kebangsaan
4	Pembentukan dan Penguatan Kapasitas Forum-forum FKUB, FPK dan FKDM Provinsi NTT
5	Penyuluhan Peraturan Perundang-undangan Bidang Politik
6	Verifikasi Bantuan Keuangan Partai Politik
7	Monitoring, Pelaporan dan Evaluasi Terpadu Kesbangpol Kabupaten/Kota
8	Koordinasi Peningkatan dan Pembinaan Ketahanan Seni, Budaya, Agama, Kemasyarakatan dan Ekonomi.
9	Peningkatan Kewaspadaan Nasional.
10	Peningkatan Koordinasi Pengendalian Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan.
11	Peningkatan Kerjasama Penanganan Aktivitas Orang Asing dan Lembaga Asing
12	Peningkatan Kerjasama dengan Aparat Keamanan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan

Program dan Kegiatan sesuai dengan DPA Tahun Anggaran 2019 :

	DPA untuk Tahun 2019
No	Program dan Kegiatan
I	PROGRAM FASILITASI POLITIK, PEMILU, BINA IDIOLOGI DAN WAWASAN KEBANGSAAN

1	Penguatan Pokja Indeks Demokrasi Indonesia Tingkat Provinsi
2	Peningkatan Wawasan Kebangsaan
3	Pembentukan dan Penguatan Kapasitas Forum-forum FKUB, FPK dan FKDM Provinsi NTT
4	Penyuluhan Peraturan Perundang-undangan Bidang Politik
5	Verifikasi Bantuan Keuangan Partai Politik
6	Monitoring, Pelaporan dan Evaluasi Terpadu Kesbangpol Kabupaten/Kota.
7	Koordinasi Peningkatan dan Pembinaan Ketahanan Seni, Budaya, Agama, Kemasyarakatan dan Ekonomi.
8	Peningkatan Kewaspadaan Nasional.
9	Peningkatan Kerjasama Penanganan Aktivitas Orang Asing dan Lembaga Asing.
10	Peningkatan Kerjasama dengan Aparat Keamanan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan.

Ket : Di dalam usulan Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2019 untuk kegiatan Orientasi Pemantapan Budaya Politik (No. 1) dan Stabilitas Politik dan kegiatan Peningkatan Koordinasi Pengendalian Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan (No. 10) tidak diakomodir dalam DPA Tahun 2019, karena tidak termuat dalam Indikator Kinerja Utama yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018 – 2023.

6 Kondisi Sarana dan Prasarana yang digunakan.

Sarana dan Prasarana kurang memadai.

7 Permasalahan dan Solusi.

Permasalahan

Permasalahan umum yang dihadapi yaitu terkait Sarana dan Prasarana kantor Badan Kesatuan Bangsa dan Politik kurang memadai.

Solusi

Terkait dengan permasalahan Sarana dan Prasarana tersebut diatas sudah dilakukan melalui usulan pada RKA Perubahan Tahun Anggaran 2019 dan RKA Tahun Anggaran 2020.

8 Hal Lain yang Dianggap Perlu Untuk Dilaporkan (tidak ada).

D. Indikator kinerja kunci

1. Tataran Pengambil Kebijakan.

Data dan Informasi hasil pengukuran capaian kinerja IKK pada Tataran Pengambil Kebijakan tersebut untuk Pemerintah Provinsi menggunakan format lampiran 1.1

2. Tataran Pelaksanaan Kebijakan.

1) Administrasi Umum (8 Aspek).

Data dan informasi hasil pengukuran capaian kinerja terhadap IKK pada Tataran Pelaksana Kebijakan tingkat Provinsi menggunakan format lampiran 1.2.

2) Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan.

a) Data dan informasi hasil pengukuran capaian kinerja terhadap kebijakan fungsi penunjang urusan pemerintahan merupakan bagian dari pada IKK pada Tataran Pelaksana Kebijakan.

b) Yang termasuk Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan yaitu Badan (perencanaan, keuangan, kepegawaian, dst)

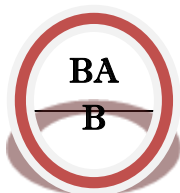
3) Urusan Pemerintahan Umum.

a) Data dan informasi hasil pengukuran capaian kinerja terhadap kebijakan urusan pemerintahan umum merupakan bagian daripada IKK pada Tataran Pelaksana Kebijakan.

b) Yang termasuk Urusan Pemerintahan Umum yaitu Kesbangpol.

4) Tataran Pelaksana Kebijakan Aspek Tingkat Capaian Kinerja Urusan Wajib dan Pilihan.

Data dan informasi hasil pengukuran capaian kinerja terhadap IKK pada Tataran Pelaksana Kebijakan Tingkat Capaian Kinerja Urusan Wajib dan Pilihan untuk Pemerintah Provinsi menggunakan Format Lampiran 1.3.



REALISASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA PEMERINTAH (RKP) TAHUN 2019

Program kerja pada OPD Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi NTT pada tahun 2019 telah sesuai Visi Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018 – 2023 yaitu : “NTT Bangkit Mewujudkan Masyarakat Sejahtera Dalam Bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia”. Mengacu pada Visi

Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur tersebut Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dengan pencapaian Misi yaitu : Menciptakan Birokrasi yang profesional dengan karakteristik adaptif, berintegritas, berkinerja tinggi, bebas dan bersih KKN. Sasaran ; Meningkatnya kualitas pelayanan publik yang efektif, akuntabel, transparan dan partisipatif.

1. Wawasan Politik Kebangsaan.

- Peningkatan Wawasan Kebangsaan.

OPD Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi NTT memfasilitasi dengan melaksanakan Lomba Pidato antar Pelajar Tk. SMU se Provinsi NTT, Forum Komunikasi Revitalisasi Pancasila, Dialog Pencegahan Idiologi lain terhadap Pancasila, Forum Desiminasi Pemantapan Wawasan Kebangsaan, Sosialisasi Wawasan Kebangsaan pada Wilayah Perbatasan Antar Negara, Dialog Interaktif Wawasan Kebangsaan di Televisi dan Radio, Penguatan Forum Pembauran Kebangsaan (FPK)

- Peningkatan Kewaspadaan Nasional.

OPD Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi NTT memfasilitasi dengan melaksanakan Rapat-rapat penanganan gangguan konflik sosial, Penyuluhan Pencegahan Penyebaran Paham radikalisme & terorisme, Sosialisasi Perda Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, Peningkatan Kerjasama Penanganan Aktivitas Orang Asing dan Lembaga Asing, Peningkatan Kerjasama dengan Aparat Keamanan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan, Penguatan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM).

2. Jumlah Partai Politik yang dibina.

- Penguatan Pokja Indeks Demokrasi Indonesia Tingkat Provinsi.

OPD Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi NTT sebagai sekretariat dalam rangka memfasilitasi Verifikasi Administrasi Bantuan Keuangan Partai Politik. Peningkatan dan pendataan angka Indeks Demokrasi di Provinsi NTT.

- Penyuluhan Peraturan Perundang-undangan Bidang Politik.

OPD Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi NTT memfasilitasi dengan melaksanakan Sosialisasi di 5 Kabupaten

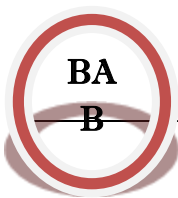
(TTS, Flores Timur, Sumba Barat Daya, Nagekeo, Manggarai Timur).

3. Jumlah Organisasi Kemasyarakatan yang dibina.

OPD Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi NTT memfasilitasi dan melaksanakan Kegiatan Rapat Koordinasi Ketahanan Keagamaan, Rapat Koordinasi Ketahanan Ekonomi dan Pendataan Ormas dan LSM, Penguatan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB).

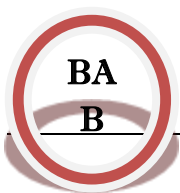
Dari Program dan kegiatan yang dilakukan oleh Badan Kesbangpol Provinsi NTT Tahun Anggaran 2019, maka realisasi target sesuai RPJMD Provinsi NTT adalah sebagai berikut :

- 1) Target capaian dalam mewujudkan Misi V untuk indikator Indeks Demokrasi, realisasi 82.32 point dari target 66.46 point di T.A 2018 yang dinilai T.A 2019.
- 2) Target capaian kinerja program untuk indikator :
 - Wawasan politik kebangsaan; realisasi 100 % dari target 60 %.
 - Jumlah Parpol yang dibina; realisasi 11 Parpol dari target 10 Parpol.
 - Jumlah Organisasi Kemasyarakatan ; realisasi 5 Ormas dari target 5 Ormas.



TUGAS PEMBANTUAN

- A. Tugas Pembantuan yang Diterima :** (tidak ada)
- B. Tugas Pembantuan yang Diberikan :** (tidak ada)



TUGAS UMUM PEMERINTAHAN

- A. Kerjasama Antar Daerah** (tidak ada)
- B. Kerjasama Daerah Dengan Pihak Ketiga** (tidak ada)

- C. Koordinasi Dengan Instansi Vertikal Di Daerah** (tidak ada)
- D. Pembinaan Batas Wilayah** (tidak ada)
- E. Pencegahan dan Penanggulangan Bencana** (tidak ada)
- F. Pengelolaan Kawasan Khusus** (tidak ada)

G. Penyelenggaraan Ketentraman Dan Ketertiban Umum

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Nusa Tenggara Timur

1. Gangguan Yang Terjadi (Konflik Berbasis SARA, Anarkisme, Separatisme atau lainnya) :

Program/Kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum guna mengantisipasi gangguan yang terjadi di daerah (konflik SARA, Anarkisme, Separatisme atau lainnya) antara lain :

- a) Koordinasi Peningkatan dan Pembinaan Ketahanan Seni, Budaya, Agama, Kemasyarakatan, dan Ekonomi.
- b) Peningkatan Kerjasama Penanganan Aktivitas Orang Asing dan Lembaga Asing.
- c) Peningkatan Kewaspadaan Nasional.
- d) Peningkatan Kerjasama dengan Aparat Keamanan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan.

2. Satuan Kerja Perangkat Daerah Yang Menangani Ketentraman Dan Ketertiban Umum:

OPD Badan Politik dan Politik Provinsi Nusa Tenggara Timur.

3. Penanggulangan dan kendalanya (tidak ada).
4. Keikutsertaan Aparat Keamanan dalam Penanggulangan (tidak ada).
5. Keikutsertaan Aparat Keamanan dalam Penanggulangan.

Pelaksanaan program maupun kegiatan dalam rangka penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum guna menanggulangi gangguan yang terjadi di daerah (konflik sara, anarkisme, separatism atau lainnya), Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Nusa Tenggara Timur selalu melibatkan/ bekerjasama serta berkoordinasi dengan aparat keamanan setempat, baik itu unsur POLRI, unsur TNI (angkatan darat, laut dan udara), Badan Intelijen Negara (BIN) maupun forum-forum di tingkat daerah yang berfungsi sebagai mitra kerja di bidang kesatuan bangsa dan politik, antara lain :

Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM), Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) serta Komunitas Intelijen Daerah (KOMINDA).

6. Sumber dan Jumlah Anggaran.

Anggaran bersumber dari APBD Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2019 Adapun jumlah anggaran per kegiatan sebagai berikut:

No	Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	(%)
1	Penguatan Pokja Indeks Demokrasi Indonesia Tingkat Provinsi	100.000.000	95.380.600	95.38
2	Peningkatan Wawasan Kebangsaan	361.608.000	322.700.330	89.24
3	Penguatan Kelembagaan FKUB, FPK dan FKDM	339.800.000	338.664.700	99.67
4	Penyuluhan Peraturan Perundang-undangan Bidang Politik	392.703.000	377.231.750	96.06
5	Verifikasi Bantuan Keuangan Partai Politik	64.821.000	61.145.200	94.33
6	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Terpadu	52.700.000	51.485.400	97.70
7	Koordinasi Peningkatan dan Pembinaan Ketahanan Seni, Budaya, Agama, Kemasyarakatan dan Ekonomi	118.836.300	100.890.900	84.90
8	Peningkatan Kewaspadaan Nasional	770.128.000	707.770.700	91.90
9	Peningkatan Kerjasama Penanganan Aktivitas Orang Asing dan Lembaga Asing	133.250.000,	115.551.000	86.72
10	Peningkatan Kerjasama dengan Aparat Keamanan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan	46.300.000	45.489.500	98.25
	Jumlah	2.380.146.300	2.216.310.080	93.12



PENERAPAN DAN PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL



AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH DAERAH

Akuntabilitas kinerja pemerintahan daerah menginformasikan capaian keberhasilan pemerintah daerah dalam pelaksanaan visi dan misi pemerintah daerah secara terukur, sebagaimana yang diperjanjikan dalam Perjanjian Kinerja Kepala Daerah. Informasi capaian akuntabilitas pemerintah daerah memuat :

a. Target kinerja dalam perjanjian kinerja:

Tabel 1.1
Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2019

Program/Kegiatan	Indikator	Kinerja		
		Target	Realisasi	Capaian %
Program Pembinaan Politik dan Perlindungan Masyarakat				
Peningkatan Wawasan Kebangsaan	1 Wawasan Politik Kebangsaan.	60%	60%	100%
Penguatan Kelembagaan FKUB, FPK dan FKDM				
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Terpadu				
Peningkatan Kewaspadaan Nasional				
Peningkatan Kerjasama Penanganan Aktivitas Orang Asing dan Lembaga Asing				
Peningkatan Kerjasama dengan Aparat Keamanan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan				
Penguatan Pokja Indeks Demokrasi Indonesia Tingkat Provinsi	2 Jumlah Partai Politik yang dibina.	10 Parpol	11 Parpol	110%
Penyuluhan Peraturan Perundang-undangan Bidang Politik				
Verifikasi Bantuan Keuangan Partai Politik				
Koordinasi Peningkatan dan Pembinaan Ketahanan Seni, Budaya, Agama, Kemasyarakatan dan Ekonomi	3 Jumlah Lembaga / organisasi kemasyarakatan.	5 Ormas	10 Ormas	200%

Dalam mendukung pencapaian pada tabel 1.1 tersebut di atas, pada Tahun 2019 Badan Kesbangpol didukung dengan pelaksanaan Program **Pengelolaan Perbatasan, Pembinaan Politik Dan Perlindungan Masyarakat** dengan rincian kegiatan sebagai berikut :

1. Indikator : Wawasan Politik Kebangsaan

Kegiatan – kegiatan yang mendukung Indikator tersebut adalah sebagai berikut :

a) Lomba Pidato Empat Konsensus Nasional Bagi Pelajar SLTA Kabupaten/Kota se Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2019.

Terlaksananya Kegiatan Lomba Pidato pada tanggal 12 dan 13 Agustus 2019, bertempat di Hotel Naka Jalan Frans Seda 21 Kupang-Nusa Tenggara Timur. Peserta yang hadir dari 6 (enam) Kabupaten yaitu Kabupaten TTU, Sabu Raijua, Sumba Barat, Sumba Barat Daya, Lembata dan Sumba Timur dan masing-masing Kabupaten terdiri dari 1 orang pelajar SMA, 1 orang guru pendamping, 1 orang Badan Kesbangpol Kabupaten. Thema Lomba adalah “ Kita Wujudkan Sumber Daya Manusia Unggul Indonesia Maju dan Berkarakter Nasional”. Hasilnya adalah 1). Pelajar SMA sebagai generasi muda memahami nilai-nilai kebangsaan sehingga dalam kehidupannya dapat mewujudkan bangsa dan Negara yang adil, makmur, sejahtera dan bermartabat. 2). Dengan pengamalan nilai - nilai Empat Konsensus Nasional, maka para pelajar SLTA sebagai generasi millennial harapan bangsa dapat menumbuhkembangkan rasa cinta tanah air, jiwa nasionalisme dan patriotisme, selalu mengembangkan kehidupan demokrasi, menjaga persatuan dan kesatuan, kerukunan serta keutuhan bangsa dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. 3) Ditetapkan juara Lomba Pidato Tingkat Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagai berikut:

No	Kriteria Juara	Nama/ Asal SMA	Kabupaten	Total Nilai
1	Juara I	Swesti Lesgi S. Taga/ PGRI WINIRAI	Sabu Raijua	86.33
2	Juara II	Kristina E. U.Lajar/ SMA Frater Don Bosco Lewoleba	Lembata	83,33
3	Juara III	Archangela Z. Hardin/ SMA I Kefamenanu	TTU	82,17
4	Juara harapan I	Aurelia Claudia Riasti/ SMAN 1 RINDI Umalulu	Sumba Timur	81.33
5	Juara harapan II	Cornelia L. T. Boro	Sumba Barat	81.11
6	Juara harapan III	Anastasia Jeni Ngara/ SMA Negeri I Kodi SBD	Sumba Barat Daya	81.03

b. Dialog Interaktif Radio dan TVRI Lokal.

- Terlaksananya Dialog di TVRI Kupang pada tanggal 14 Agustus 2019, dengan Narasumber Gubernur NTT.
- Terlaksananya Dialog di RRI Kupang pada tanggal 26 September 2019, dengan Narasumber Kepala Bidang Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi NTT.
- Terlaksananya Dialog TVRI Kupang pada tanggal 6 Desember 2019, dengan Narasumber Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi NTT.

Thema dialog adalah Menjaga Nilai Integritas, Etos Kerja dan Gotong Royong Menuju Indonesia Maju.

Hasilnya adalah terlaksananya dialog dalam upaya menjaga nilai integritas, etos kerja dan gotong royong menuju Indonesia maju yang membutuhkan partisipasi aktif seluruh elemen masyarakat NTT sebagai warga Negara Indonesia, sekaligus upaya menanamkan dan menumbuhkan nilai-nilai tersebut sejak dini bagi generasi penerus bangsa dalam mewujudkan persatuan dan kesatuan Bangsa Indonesia.

c. Sosialisasi wawasan kebangsaan pada Wilayah Perbatasan Antar Negara.

- Terlaksananya Sosialisasi wawasan kebangsaan pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2019, bertempat di Desa Maritaing Kecamatan Alor Timur.
- Terlaksananya Sosialisasi wawasan kebangsaan pada hari Jumat tanggal 19 Juli 2019, bertempat di Kecamatan Kobalima Kabupaten Malaka.

Peserta sosialisasi masing-masing berjumlah 70 (tujuh puluh) orang terdiri dari generasi milenial / generasi muda (Pelajar : 9 orang, Tokoh Muda Agama/ Pemuda/i Gereja : 15 orang, Tokoh Pemuda/i : 36 orang), Guru : 5 orang, dan Instansi terkait lingkup Pemerintah Kecamatan: 5 orang.

Hasilnya adalah : 1). Peserta dapat memahami nilai-nilai luhur yang terkandung dalam Empat Konsensus Kebangsaan yaitu Pancasila, UUD' 1945, NKRI dan Bhineka Tunggal Ika yang harus diwujudkannyatakan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. 2). Meningkatnya rasa nasionalisme serta patriotisme peserta. 3). Pernyataan sikap kebangsaan Sejuta Cinta Generasi Milenial dari perbatasan antar Negara.

d. Kegiatan Forum komunikasi Revitalisasi Pancasila.

Terlaksananya kegiatan pada hari Selasa, tanggal 30 April 2019 di Ende Kabupaten Ende. Peserta berjumlah 90 orang yang terdiri dari Aparat Badan Kesbangpol Kabupaten Ende, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh perempuan, tokoh pemuda, pengurus partai politik, Ormas, LSM, mahasiswa dan Pelajar di Kabupaten Ende, dengan hasil kegiatan adalah Adanya komitmen Peserta dengan rekomendasi sebagai berikut:

Penguatan kapasitas masyarakat melalui penanaman nilai-nilai luhur Pancasila sebagai idiologi negara, yang dimulai dari keluarga.

- Pemerintah perlu membangun Rumah Pancasila dalam memperkuat literasi Pancasila.
- Rencana Aksi Revitalisasi nilai-nilai Pancasila dimulai dari Pendidikan dalam dan luar sekolah, Ormas/NGO di setiap wilayah Provinsi NTT.
- Mengumandangkan lagu Indonesia Raya dua kali sehari di tempat umum dan tempat aktifitas lainnya (Telah dikeluarkan Surat Gubernur NTT Nomor: BU.003/126/KESBANGPOL/2019, tanggal 17 Mei 2019, kepada Para Bupati se NTT, Walikota Kupang serta kepada seluruh Pimpinan OPD/ Instansi vertical/ BUMN/BUMD/Perusahaan Swasta/ Pimpinan Organisasi Lingkup Provinsi NTT)
- Peringatan HUT RI dimeriahkan sampai ke tingkat Dusun.

e. Kegiatan Forum Desiminasi Pemantapan Wawasan Kebangsaan di Kabupaten Sumba Timur, Alor, Manggarai Barat.

- Terlaksananya kegiatan Forum Desiminasi Pemantapan Wawasan Kebangsaan di Kabupaten Sumba Timur, pada tanggal 11 Pebruari 2019.
- Terlaksananya kegiatan Forum Desiminasi Pemantapan Wawasan Kebangsaan di Kabupaten Alor, pada hari Kamis tanggal 23 Mei 2019.
- Terlaksananya kegiatan Forum Desiminasi Pemantapan Wawasan Kebangsaan di Kabupaten Manggarai Barat pada pada hari Jumat tanggal 20 Juni 2019.

Peserta masing-masing kegiatan berjumlah 70 orang yang terdiri dari tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh perempuan, tokoh pemuda, guru, para pelajar, pengurus parpol, Ormas/LSM, Instansi terkait lingkup Pemerintah Kabupaten. Hasil kegiatan adalah : 1). Adanya pemahaman Peserta tentang pentingnya wawasan kebangsaan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. 2). Adanya pemahaman yang sama bahwa Pancasila adalah satu-satunya ideologi bangsa Indonesia dan karenanya tidak ada ideologi lain selain Pancasila. 3). Khusus di Kabupaten Manggarai Barat, merekomendasikan siap untuk menjadi “Laboratorium Wawasan Kebangsaan untuk Indonesia”, sehubungan dengan keteguhan masyarakat Manggarai Barat pada nilai-nilai persaudaraan, kekeluargaan dan kegotongroyongan.

f. Dialog pengaruh ideologi lain terhadap ideologi Pancasila lintas generasi.

Terlaksananya Dialog tersebut di Ende Kabupaten Ende pada hari Selasa tanggal 19 November 2019. Peserta berjumlah 70 orang yang terdiri dari tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh perempuan, tokoh pemuda, guru, para pelajar, pengurus parpol, Ormas/LSM, Instansi terkait lingkup Pemerintah Kabupaten . Hasil kegiatan adalah 1)

Peserta dapat memahami pentingnya Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan dimaknai dalam berbagai dimensi kehidupan berbangsa dan bernegara. 2) Peserta dapat memahami nilai-nilai luhur bangsa sebagai panduan kehidupan dalam mewujudkan masyarakat yang adil, makmur, sejahtera dan bermartabat. 3) Meningkatnya rasa nasionalisme dan patriotisme generasi millenial untuk berpartisipasi aktif menjaga negeri ini dari upaya-upaya menggantikan ideologi pancasila dengan ideologi lain.

g. Kegiatan: Penguatan Kelembagaan FKUB, FPK dan FKDM

1) Penguatan Kelembagaan FKUB.

- Terlaksananya Rapat Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Provinsi Nusa Tenggara Timur Caturwulan I, pada hari Selasa, tanggal 12 Maret 2019, bertempat di Gedung Sekretariat FKUB, dengan agenda : Persiapan Rakor Peningkatan dan Pembinaan Ketahanan Agama Tingkat Provinsi dan Kabupaten Kota Tahun 2019 yang direncanakan akan dilaksanakan di Kabupaten Ende. Peserta dihadiri oleh 24 orang. Hasilnya adalah adanya konsep/skenario rapat koordinasi.
- Terselenggaranya Rapat Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Provinsi Nusa Tenggara Timur Caturwulan II, pada tanggal 15 Juni 2019, dihadiri oleh 18 orang terdiri dari anggota FKUB dan sekretariat FKUB, bertempat di Gedung Sekretariat FKUB. Hasilnya adalah adanya konsep/instrumen untuk anggota melakukan perjalanan Dinas monitoring dan penguatan FKUB di Kabupaten/Kota se NTT dengan prioritas daerah yang rawan konflik dan daerah yang akan menyelenggarakan Pilpres dan Pileg serentak.
- Terlaksananya Rapat Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Provinsi Nusa Tenggara Timur Caturwulan III, pada tanggal 4 September 2019, bertempat di Ruang Rapat Badan Kesbangpol Provinsi NTT. Peserta Rapat 18 orang terdiri dari anggota FKUB Provinsi NTT dan sekretariat FKUB. Hasilnya adalah :
 - Sinergi Rakor dengan Forum yang lain (FPK, FKDM) dan pelaksanaannya pada tanggal 13 September 2019.
 - Rekomendasi rakor harus ada tindakan aksi.
 - Adanya konsep / saran tema.
- Terlaksananya Rapat Kerja Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota se Nusa Tenggara Timur Tahun 2019 di Aula Hotel Sasando Kota Kupang pada tanggal 13 September 2019. Diikuti oleh Anggota FKUB serta Sekretariat Tk. Provinsi, Anggota FKUB Tk. Kabupaten/Kota, Kepala Badan Kesbangpol Kabupaten/Kota sebanyak 60 orang. Hasil Rekomendasi Rapat Kerja FKUB adalah :
 - FKUB diharapkan dapat memperbanyak intensitas dialog dengan memperluas kelompok kategorial dan diperkaya dengan bentuk kegiatan yang bervariasi .

- Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/ Kota mendorong dan memfasilitasi terbentuknya FKUB sampai ditingkat Kecamatan bahkan sampai di tingkat Desa/ Kelurahan dengan tetap memperhatikan ketentuan yang berlaku.
- Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi dan Kabupaten/ Kota diharapkan dapat memberi dukungan bagi keberlangsungan kerukunan umat beragama dan merawat persatuan dan kesatuan bangsa di Nusa Tenggara Timur, dengan tetap memperhatikan ketentuan perundang-undangan dan kemampuan keuangan daerah.
- Penguatan Kelembagaan FKUB di Kabupaten/Kota.
- Terlaksananya Kegiatan Penguatan FKUB di 6 Kabupaten/ Kota (Kota Kupang, Kabupaten Sumba Barat Daya, Alor, Ende, Manggarai Barat dan Rote Ndao) dengan hasil terwujudnya penguatan FKUB Kabupaten/Kota melalui sinergi program/kegiatan dan pemberian penghargaan berupa honor kepada 21 (dua puluh satu) orang anggota FKUB Provinsi NTT.

2) Penguatan Kelembagaan FKDM

- Terlaksananya Rapat Anggota Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat Tingkat Provinsi NTT ke I, pada tanggal 17 Juli 2019, bertempat di ruang kerja Kepala Badan Kesbangpol Provinsi NTT. Peserta rapat adalah anggota Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat dan sekretariat FKDM. Hasil rapat adalah 1). Forum harus mempunyai data dan informasi. 2). Memaksimalkan peran dan fungsi FKDM dengan perluasan jejaring kerja. 3). Bersinergi program dengan FPK dan FKUB .
- Terlaksananya kegiatan rapat Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) tingkat Provinsi Nusa Tenggara Timur ke II, pada tanggal 9 Agustus 2019, bertempat di ruang kerja Kepala Badan Kesbangpol Provinsi NTT. Peserta rapat adalah : anggota Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat Tingkat Provinsi Nusa Tenggara Timur dan sekretariat FKDM. Hasilnya adalah 1). FKDM siap menciptakan situasi yang kondusif dalam rangka upacara peringatan HUT Proklamasi Kemerdekaan RI pada tanggal 17 Agustus 2019. 2). Adanya konsep/ skenario Rapat Koordinasi Forum-Forum (FPK, FKUB, FKDM) Kabupaten/Kota dan Provinsi NTT. 3). Terkait masalah penyerangan mahasiswa Papua di Malang, Surabaya dan Semarang, maka perlu diberikan pemahanan kepada generasi masa kini tentang pentingnya memupuk persatuan dengan menanamkan nilai kebersamaan dan saling menghargai meskipun berbeda, tapi kita tetap satu karena ada yang mengikat kita yaitu Pancasila. 4) Kita harus tetap menjaga agar jangan sampai NTT terprovokasi dengan berbagai isu-isu yang

mengarah kepada perpecahan. 5). Kaitan dengan belum terbentuknya Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) di Kabupaten Malaka, maka perlu anggota Tim FKDM Provinsi melakukan penguatan ke Pemerintah Kabupaten Malaka dan sekaligus melakukan sosialisasi tentang pentingnya pemerintah kabupaten bermitra dengan Forum-Forum guna bersama-sama melakukan fungsi Kewaspadaan Dini terhadap berbagai macam bentuk ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan yang akan mengancam keamanan daerah.

- Terlaksananya kegiatan rapat Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) tingkat Provinsi Nusa Tenggara Timur ke III, pada hari Jumat, tanggal 6 September 2019, bertempat di ruang kerja Kepala Badan Kesbangpol Provinsi NTT. Peserta rapat adalah Anggota FKDM dan Sekretariat FKDM. Hasilnya adalah 1) Adanya komitmen FKDM untuk mendukung Visi, Misi Gubernur dan Wakil Gubernur NTT serta program kerja Badan Kesbangpol Provinsi NTT, khususnya dalam menjaga Negara Kesatuan Republik Indonesia agar tetap aman dan kondusif. 2) Kaitan dengan hal di atas, Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) mengharapkan agar Program strategis yang telah dibuat oleh Gubernur dan Wakil Gubernur NTT harus benar - benar diimplementasikan sampai menyentuh kebutuhan masyarakat. 3) Perlu dilakukan kajian yang mendalam terkait fenomena akhir-akhir ini, banyak peneliti dari luar daerah yang sering melakukan penelitian dan kajian hanya terfokus di satu Kabupaten. 4) Dalam rangka Kewaspadaan Nasional, maka perlu pelibatan semua institusi untuk meningkatkan semangat kebersamaan dengan seluruh tokoh agama dan tokoh pemuda (GMNI, GMKI, PMKRI, HMI) agar dapat membangun pemahaman yang sama dalam meningkatkan Kewaspadaan Dini terkait dengan ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan (ATHG). 5) Rapat Kerja Forum-Forum (FKDM, FKUB, FKDM) Kabupaten/Kota se NTT perlu disinergikan pelaksanaannya agar peran masing-masing forum sebagai mitra pemerintah dapat berjalan maksimal dan direncanakan pelaksanaannya pada tanggal 13 September 2019.
- Terlaksananya kegiatan Rapat Kerja Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) tingkat Provinsi Nusa Tenggara Timur pada hari Jumat, 13 September 2019, bertempat di Aula Hotel Sasando-Kota Kupang. Peserta rapat berjumlah 60 orang terdiri dari Badan Kesbangpol Provinsi, Ketua FKDM Kabupaten/Kota, Anggota FKDM Tingkat Provinsi NTT, Dit Intelkam Polda NTT, Kasi Intel Korem 161/WS, Binda NTT. Hasilnya adalah 1). Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) sebagai wadah deteksi dini berkewajiban memberikan informasi kepada pemerintah daerah berkaitan dengan berbagai potensi konflik, bencana (banjir, kekeringan) maupun ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan (ATHG). 2). Pembentukan FKDM

sampai ke tingkat kecamatan. 3). Pemerintah Kabupaten/Kota perlu memberi dukungan dan perhatian kepada FKDM Tingkat Kabupaten/Kota.

3) Penguatan Kelembagaan FKDM di Kabupaten/Kota.

- Pelaksanaan Penguatan di Kabupaten TTS, Ngada, Flores Timur, Malaka, Sumba Barat Daya, Sumba Timur. Hasilnya adalah terwujudnya penguatan FKDM di 6 Kabupaten yaitu :
 - Mendorong pembentukan FKDM sampai ke tingkat kecamatan;
 - Mendorong Kabupaten Malaka membentuk FKDM;
 - Sosialisasi dan sinergi program dan kegiatan.
- Pemberian penghargaan berupa honor kepada 5 (lima) anggota FKDM Provinsi NTT.

4) Penguatan Kelembagaan FPK.

- Penguatan Kelembagaan FPK di 8 (delapan) Kabupaten dengan hasil:
 - Mendorong pemerintah Kabupaten Malaka membentuk OPD Kesbangpol sehingga dapat fasilitasi pembentukan Forum-Forum yang akan menjadi Mitra Pemerintah. Hasilnya Pemerintah Kabupaten Malaka telah membentuk Perangkat Daerah Badan Kesbangpol.
 - Pemerintah Kabupaten Alor mendukung dan fasilitasi FPK Kabupaten Alor untuk meningkatkan perannya dalam menjaga persatuan dan kesatuan masyarakat di Kabupaten Alor.
 - Mendorong FPK di Kabupaten Sabu Raijua untuk memaksimalkan perannya sesuai PERMEN Nomor 34 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pembauran Kebangsaan di Daerah.
 - Mendorong pemerintah Kabupaten Manggarai Barat, Rote Ndao, Sikka, TTU, dan TTS untuk memberi perhatian dan fasilitasi FPK yang sudah terbentuk sehingga dapat melaksanakan tugas dan fungsinya.
- Pemberian penghargaan berupa honor kepada anggota FPK.
- Terlaksananya Rapat Koordinasi Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) Tingkat Provinsi Nusa Tenggara Timur ke I, pada hari Jumat, tanggal 5 April 2019, bertempat di Ruang Rapat Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Nusa Tenggara Timur. Peserta rapat adalah : anggota Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) dan Sekretariat FPK Provinsi NTT. Hasilnya adalah :
 - FPK perlu memberi perhatian dan menjaga hubungan antar ras, etnik, suku, agama dan golongan serta asal daerah menjelang pelaksanaan Politik di Daerah.
 - Mendorong pemerintah menyelesaikan Pembangunan Monumen Pancasila.
 - Terinformasinya kegiatan – kegiatan yang akan dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2019.

- Pergantian anggota FPK yang tidak aktif.
- Terselenggaranya rapat koordinasi FPK Provinsi Nusa Tenggara Timur ke II, pada tanggal 10 April 2019, bertempat di Ruang Rapat Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Nusa Tenggara Timur. Peserta rapat adalah anggota Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) dan sekretariat FPK Provinsi NTT. Hasilnya adalah : Perlunya pemahaman bagi Komunitas dalam Wilayah NTT dalam menjaga persatuan dan kesatuan sebagai sesama anak bangsa.
- Terselenggaranya rapat koordinasi FPK Provinsi Nusa Tenggara Timur ke III, pada tanggal 5 September 2019, bertempat di Ruang Rapat Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Nusa Tenggara Timur. Peserta rapat adalah anggota FPK dan sekretariat FPK Provinsi Nusa Tenggara Timur, serta Ketua FPK Kabupaten Sabu Raijua. Hasilnya adalah : Penetapan waktu dan skenario Rapat Koordinasi Forum Pembauran Kebangsaan dengan Para Kepala Badan Kesbangpol Kab/Kota serta Forum Pembauran Kebangsaan Kabupaten/Kota pada Minggu ke 3 bulan September 2019.
- Terselenggaranya rapat kerja FPK Provinsi Nusa Tenggara Timur pada tanggal 13 September 2019, bertempat di Aula Hotel Sasando - Kota Kupang. Peserta rapat terdiri dari Anggota FPK Tingkat Provinsi, Ketua FPK Kabupaten/Kota, Ketua-ketua etnis di NTT. Hasilnya adalah : Adanya rekomendasi sebagai berikut : 1). Pembangunan monument Pancasila dilanjutkan sesuai kemampuan keuangan daerah; 2). Perlu dilakukan pertemuan antar lintas generasi dan etnis pada setiap HUT Kemerdekaan RI diseluruh NTT; 3). Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten / Kota mendorong dan memfasilitasi terbentuknya FPK sampai di tingkat Kecamatan, bahkan sampai di tingkat Desa / Kelurahan dengan tetap memperhatikan ketentuan yang berlaku; 4). Pemerintah daerah dan DPRD Provinsi dan Kabupaten / Kota diharapkan dapat memberi dukungan bagi keberlangsungan pembauran kebangsaan dalam menjaga dan merawat persatuan dan kesatuan bangsa di NTT.

2. Indikator : Jumlah Partai Politik yang dibina.

a) Pemantauan Pra Pileg dan Pilpres Tahun 2019.

- Terlaksananya kegiatan Pemantauan Pra Pileg dan Pilpres Tahun 2019, di 22 Kabupaten/Kota. Hasilnya adalah Pemerintah Kabupaten/Kota se Provinsi Nusa Tenggara Timur terus melakukan berbagai langkah-langkah antisipasif terhadap perkembangan dinamika masyarakat di Daerah antara lain : 1). Pemetaan lokasi-lokasi rawan konflik sosial sekaligus melakukan pemantauan secara kontinyu. 2). Rapat-rapat koordinasi dengan Forum-forum terkait yaitu FKUB, FPK, FKDM dan Kominda dalam rangka mengantisipasi secara dini kemungkinan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. 3). Menggelar forum-forum dialog dengan pimpinan Partai Politik, Tokoh

Agama, Tokoh Masyarakat serta penyelenggara Pemilu (KPU dan Bawaslu) dalam rangka rekonsiliasi harmonisasi sosial kemasyarakatan yang rukun dan harmonis. 4). Secara umum, perkembangan situasi dan kondisi sosial politik masyarakat di Kabupaten / Kota se Provinsi Nusa Tenggara Timur Pra Pemilu Serentak tanggal 17 April 2019 (H-7) berdasarkan hasil monitoring dan koordinasi dengan instansi terkait tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota, masih tetap kondusif, artinya tidak terjadi tindakan-tindakan instabilitas di daerah yang dapat diduga menciderai stigma Luber dan Jurdil dalam Pemilu Serentak Tahun 2019 walaupun hasil rekapitulasi perolehan suara Pemilu Serentak Tahun 2019 telah dipublikasikan di tingkat TPS dan PPK. 5). Kekurangan Logistik di beberapa TPS di tingkat Kecamatan masih terus diupayakan distribusinya.

b) Pemantauan Kegiatan Pasca Pileg dan Pilpres Tahun 2019.

Kegiatan Pasca Pemungutan Suara Tanggal 17 April 2019.

Hasil kajian Bawaslu Kabupaten/Kota se Provinsi Nusa Tenggara Timur terkait dengan proses Pemungutan Suara Pemilu Serentak tanggal 17 April 2019, di rekomendasikan kepada 18 KPU Kabupaten/Kota se Provinsi NTT untuk melakukan Pemungutan Suara Lanjutan (PSL), Pemungutan Suara Ulang (PSU) pada tanggal 27 April 2019, dengan rincian :

No	Kabupaten / Kota	PSL	PSU	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih/ Orang
1	Sikka	✓		5	855
2	Kota Kupang		✓	3	707
3	Kupang	✓		3	768
4	TTS	✓		12	2.041
5	TTU	✓		1	237
6	Belu	✓		1	139
7	Malaka	✓		2	471
8	Lembata	✓		2	379
9	Ende	✓		3	488
10	Ngada	✓		1	245
11	Nagekeo	✓		2	458
No	Kabupaten / Kota	PSL	PSU	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih/ Orang
12	Manggarai	✓		5	1.236
13	Manggarai Barat	✓		2	325
14	Sumba Timur	✓		5	1.245
15	Sumba Tengah	✓		1	178
16	Sumba Barat Daya	✓		1	231
17	Rote Ndao	✓		1	191
18	Sabu Raijua	✓		2	425

- Data Perolehan Suara Pemilu Serentak Kabupaten Kota se Provinsi NTT.

Tingkat partisipasi politik pemilih pada Pemilu Serentak Tahun 2019 di Kabupaten/Kota se NTT sangat variatif, namun cukup signifikan bila dibandingkan dengan Pemilu/Pilkada sebelumnya karena prosentase partisipasi politik masyarakat semua Kabupaten/Kota menembus diatas rata-rata nasional yaitu 75,00 persen. Data partisipasi politik Pemilu Serentak Tahun 2019 di Kabupaten/Kota se NTT :

No.	Kabupaten/Kota	Jumlah Pemilih	Suara Masuk /Partisipasi (%)	Suara Tdk Masuk /Golput (%)
1	2	3	4	5
1	Kota Kupang	252.128	116.709; (79,74)	51.076; (19,26)
2	Kab. Kupang	222.020	180.525; (81,31)	41.495; (18,74)
3	TTS	299.838	230.740; (76,95)	69.098; (23,05)
4	TTU	168.049	132.966; (79,12)	35.083; (20,88)
5	Belu	134.122	101.323; (75,55)	32.799; (24,45)
6	Alor	136.718	116.079; (84,90)	20.639; (15,10)
7	Flores Timur	164.513	134.267; (81,61)	30.246; (18,49)
8	Lembata	82.312	68.663; (83,42)	13.649; (16,58)
9	Sikka	197.823	171.330; (86,61)	26.493; (13,39)
10	Ende	168,266	147.946; (87,92)	20.320; (12,08)
11	Nagekeo	100.493	80.115; (79,72)	20.378; (20,28)
12	Ngada	107.427	84.545; (78,70)	22.882; (21,30)
13	Manggarai	209.839	167.140; (79,65)	42.699; (20,35)
14	Manggarai Barat	167.880	138.724; (82,63)	29.156; (17,37)

15	Manggarai Timur	199.335	151.326; (75,92)	48.009; (24,08)
16	Sumba Timur	167.712	131.696; (78,53)	36.016; (21,47)
1	2	3	4	5
17	Sumba Barat	79.319	61.166; (77,11)	18.153; (22,89)
18	Sumba Tengah	49.249	38.700; (78,58)	10.549; (21,42)
19	Sumba Barat Daya	225.200	174.495; (77,48)	50.705; (22,52)
20	Rote Ndao	88.853	71.335; (80,28)	17.518; (19,72)
21	Sabu Raijua	53.812	42.020; (78,09)	11.792; (21,91)
22	Malaka	122.361	92.310; (75,44)	30.051; (24,66)
Provinsi NTT		3.397.269	2.718.463 (80,01)	876.806; (19,99)

- Pelanggaran Pemilu 2019.

Secara kuantitatif, pelanggaran yang terjadi sejak Tahap Pendaftaran Pemilih (DP4) hingga Tahap Pleno Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara (Pasca) Pemilu Serentak Tahun 2019 di Kabupaten/Kota se Provinsi Nusa Tenggara Timur berjumlah 87 kasus dengan rincian; Temuan oleh Bawaslu sebanyak 42 kasus dan Laporan Masyarakat sebanyak 45 kasus.

Khusus pelanggaran pada periode Pasca Pemilu 2019 (17 April 2019 hingga Pleno Rekapitulasi Penghitungan Suara) tercatat sebanyak 32 kasus dengan rincian yakni Temuan Bawaslu Provinsi dan Kabupaten / Kota sebanyak 19 kasus dan Laporan Masyarakat sebanyak 13 kasus. Dari 32 pelanggaran tersebut, 2 kasus diantaranya tidak diregistrasi sedangkan 30 kasus diregistrasi oleh Bawaslu dan setelah diverifikasi lebih lanjut, terdapat 14 kasus dinyatakan tidak memenuhi unsur-unsur pelanggaran sesuai ketentuan yang berlaku sehingga jumlah pelanggaran yang benar-benar memenuhi syarat formil maupun

materil sebanyak 18 kasus dengan bentuk-bentuk pelanggaran sebagai berikut :

- Pelanggaran Administrasi sebanyak 1 kasus;
- Pelanggaran Kode Etik sebanyak 2 kasus;
- Pelanggaran Pidana sebanyak 13 kasus;
- Pelanggaran lainnya sebanyak 2 kasus.

Bawaslu Kabupaten/Kota se NTT telah memproses sebanyak 12 (dua belas) kasus pelanggaran Pidana Pemilu hingga putusan Pengadilan. Sedangkan penanganan pelanggaran Administrasi, Kode Etik dan pelanggaran lainnya dilakukan dengan mengeluarkan Rekomendasi kepada penyelenggara Pemilu (KPU) seperti Pemungutan Suara Ulang (PSU), Pemungutan Suara Lanjutan (PSL), Penghitungan Suara Ulang di Tingkat TPS dan lain sebagainya. Kinerja Bawaslu Kabupaten/Kota yang merekomendasikan kepada KPU di daerah untuk melaksanakan PSU dan PSL adalah bukti profesionalisme yang patut diberi proviciat.

Pleno rekapitulasi penghitungan perolehan suara di Kabupaten/Kota. Data hasil perolehan suara untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden mencatat bahwa Calon Presiden dan Wakil Presiden Nomor Urut 01 (Ir. Joko Widodo dan Prof. Ma'ruf Amin) masih mendominasi perolehan suara di Kabupaten / Kota se NTT.

c) Sosialisasi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum .

- Terlaksananya Sosialisasi UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum di Kabupaten Timor Tengah Selatan, pada tanggal 28 Februari 2019, di Aula Kantor Lurah Tufneno Kecamatan Kota SoE, Kabupaten TTS, dibuka oleh Asisten Pemerintahan Umum dan Kesra Sekda Kabupaten TTS atas nama Gubernur NTT.
- Terlaksananya Sosialisasi UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum di Aula Sekda Kabupaten Flores Timur Kabupaten Flores Timur, pada tanggal 12 Maret 2019, dibuka oleh Asisten Pemerintahan Umum dan Kesra Sekda Kabupaten Flores Timur atas nama Gubernur NTT.
- Terlaksananya Sosialisasi UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum di Aula BKD Kabupaten Sumba Barat Daya, pada tanggal 22 Maret 2019, dibuka oleh Kepala Badan Kesbangpol Kabupaten Sumba Barat Daya atas nama Gubernur NTT.

- Terlaksananya Sosialisasi UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum di Aula Hotel Pelangi-Borong Kabupaten Manggarai Timur, pada tanggal 25 Maret 2019, dibuka oleh Bupati Manggarai Timur, atas nama Gubernur NTT dihadiri pula oleh Wakil Bupati Manggarai Timur.

Peserta dari masing-masing kabupaten berjumlah 40 orang yang terdiri dari: Partai Politik, Organisasi Kemasyarakatan/LSM, Tokoh Masyarakat, Aparatur Badan Kesbangpol, KPU Kabupaten, Panwaslu Kabupaten, Camat, Lurah/Kepala Desa dan Pemilih Pemula (Pelajar tingkat SLTA), Instansi Terkait Lingkup Pemerintah Kabupaten. Hasilnya adalah :

- Tersosialisasinya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu dan adanya pemahaman bagi 160 orang perwakilan peserta dari Kabupaten TTS, Flotim, SBD dan Kabupaten Manggarai Timur tentang Pemilu.

d) Kegiatan Verifikasi Bantuan Keuangan Partai Politik.

1). Terlaksananya Rapat Tim Bantuan Keuangan Parpol Verifikasi Data Kelembagaan Parpol masing-masing :

- Penyerahan LPJ Bantuan Keuangan ParPol kepada BPK, pada hari Selasa, 29 Januari 2019, bertempat di Ruang Rapat Badan Kesbangpol Prov. NTT. Peserta terdiri atas : Tim 7, Badan Kesbangpol Prov.NTT, Parpol dan BPK. Hasilnya adalah : Diterimanya Laporan Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Parpol dari Partai Politik kepada BPK NTT.
- Rapat Tim Verifikasi Bantuan Keuangan ParPol pada tanggal 14 Maret 2019, bertempat di Ruang Rapat Badan Kesbangpol Prov. NTT. Peserta terdiri atas : Tim 7 dan Badan Kesbangpol Prov.NTT. Hasilnya adalah : Terverifikasinya administrasi pencairan bantuan keuangan parpol, untuk selanjutnya disampaikan permohonan persetujuan pencairan oleh Gubernur yang akan ditindak lanjuti oleh Badan Kuangan Daerah Provinsi NTT.
- Rapat Tim Verifikasi Triwulanan pada tanggal 11 Juni 2019, bertempat di Ruang Rapat Badan Kesbangpol Prov. NTT. Peserta rapat berjumlah 25 orang terdiri atas : Tim 7 dan Badan

Kesbangpol Prov.NTT. Hasilnya adalah : 1). Terevaluasinya LHP BPK perwakilan NTT dan adanya peningkatan terhadap kepatuhan dalam mempertanggungjawabkan Penerimaan dan Pengeluaran Bantuan Keuangan Parpol dengan Predikat telah “Memadai” dari 2 (dua) Parpol di T.A 2017 menjadi 5 (lima) Parpol di T.A 2018 yaitu : Partai GOLKAR, Partai NASDEM, Partai PAN, Partai HANURA, Partai PKS. 2). Terealisasinya bantuan Keuangan Parpol tahap I kepada 10 (sepuluh) Parpol hasil Pemilu 2014 melalui Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT. 3). Adanya Surat Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Nomor : BKP.B.200/63/Pol/10/2019, tanggal 16 September 2019 perihal Pengajuan Bantuan Keuangan Partai Politik Tahun 2019 untuk pencairan tahap II hasil Pemilu 2019.

- Rapat Tim Verifikasi Triwulan pada tanggal 30 September 2019, bertempat di Ruang Rapat Badan Kesbangpol Provinsi NTT. Peserta terdiri dari Tim 7, Badan Kesbangpol Provinsi NTT dan Parpol. Hasilnya adalah : Adanya komitmen Parpol bahwa Laporan Pertanggungjawaban bantuan keuangan Parpol disampaikan sesuai ketentuan dan tepat waktu yaitu pada bulan Januari tahun berjalan.

2). Pelaksanaan perjalanan dinas Hasil penilaian dan hasil kajian Bantuan Keuangan Partai Politik Kab/Kota dan Provinsi.

Tersedianya dokumen penilaian dan hasil kajian Bantuan Keuangan Partai Politik Kabupaten/Kota dan Provinsi. Waktu pelaksanaan Bulan Pebruari s/d November.

Hasilnya adalah :

- 9 (Sembilan) Kabupaten/Kota yaitu Kota Kupang, Kabupaten Kupang, Malaka, Flores Timur, Lembata, Sikka, Ngada, Manggarai dan Sumba Barat Daya sebagai representase dari 22 Kabupaten dan Kota se NTT menunjukkan adanya peningkatan peran dan fungsi parpol di daerah. Hal ini terlihat dari penilaian dan pengkajian bantuan keuangan kepada partai politik yang telah di berikan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota yang kesemuanya dapat dimanfaatkan dengan baik dan benar penggunaan dana bantuan keuangan partai politik.
- Bantuan Keuangan kepada Parpol Tingkat Provinsi dan Kabupaten/ Kota yang mendapatkan kursi di DPRD Provinsi NTT

diproses sesuai mekanisme dan prosedur yang berlaku.

- Peran Parpol untuk mewujudkan pengelolaan keuangan yang bersih, transparan, dan akuntabel adalah Parpol itu sendiri. Parpol perlu mempunyai pemahaman yang memadai tentang bagaimana pengelolaan dana bantuan bagi parpol.
- Realisasi bantuan keuangan partai politik Provinsi dan Kabupaten/Kota adalah sebagai berikut :

NO	PROVINSI DAN KABUPATEN/ KOTA	NILAI PER SUARA SEBELUM BERLAKU PP NO.1 THN 2018 (Rp)	NILAI PER SUARA SESUDAH BERLAKU PP NO 1 THN 2018 (Rp)	JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK YANG MENDAPAT KURSI PEMILU 2004-2019	JUMLAH BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK (APBD 2019) (Rp)
1	2	3	4	5	6
1	Nusa Tenggara Timur	559,81.	1.200	2.018.501.	2.422.201,200.-
2	Sabu Raijua	11.778.	13.278	33.961.	600.000.000.-
3	Sumba Timur	8.281,291.	8.281,291	102.641.	850.000.000.-
4	Sumba Tengah	13.387.	13.387.	29.879.	399.989.900.-
5	Sumba Barat	15.652.	15.652.	44.722.	699.988.740.-
6	Sumba Barat Daya	7.094.	7.094.	160.388	1.137.792.900.-
7	Flores Timur	4.713.	4.713.	112.527.	530.339.751.-
1	2	3	4	5	6
8	Ende	8.271.	8.271.	85.673.	708.650.773.-
9	Sikka	4.829.	1.500.	148.146.	715.397.577.-
10	Kota Kupang	4.464.	4.464.	167.069.	745.796.016.-
11	Nagekeo	10.300.	10.300.	69.754.	718.466.200.-
12	Manggarai Barat	5.621.	5.621.	121.071.	680.540.091.-
13	Manggarai Timur	4.120.	4.120.	125.827.	518.407.240.-
14	Rote Ndao	9.327.	9.327.	60.642.	565.607.934.-
15	Kupang	4.900.	4.900.	144.646.	708.765.400.-
16	Timor Tengah Selatan	2.969.	1.500.	197.151.	295.726.500.-
17	Timor Tengah Utara	5.806.	5.806.	114.016.	661.978.000.-
18	Belu	5.666.	5.666.	85.548.	484.714.968.-
19	Alor	4.992.	4.992.	100.308.	500.738.000.-
20	Malaka	5.666.	5.666	79.191	426.389.164.-
21	Ngada	12.989,905	12.989,905	64.545	838.433.417.-
22	Manggarai	4.120.	4.120.	145.853.	600.790.760.-
23	Lembata	9.035	9.035	59.039	533.299.297.-

3. Indikator : Jumlah Lembaga / organisasi kemasyarakatan.

- Terlaksananya Rapat Koordinasi Ketahanan Keagamaan pada hari Selasa, tanggal 30 April 2019, bertempat di Aula Rumah Bina Kerahiman Ilahi Ende, dengan Tema “Merekatkan Kebersamaan Hidup yang Rukun Dalam Mendukung Pembangunan di Provinsi Nusa Tenggara Timur”. Adapun peserta kegiatan berjumlah 90 (Sembilan puluh) orang terdiri dari Kaban/Kakan Kesbangpol Kabupaten/Kota se Provinsi Nusa Tenggara Timur, FKUB Tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Provinsi NTT. Hasilnya adalah dikeluarkannya Surat Gubernur NTT kepada Walikota Kupang dan Para Bupati se NTT Nomor : BU.450/08/BKBP/2019 tanggal 8 Mei 2019 perihal Penyampaian Hasil Rakor untuk ditindak lanjuti yaitu :
 - Badan Kesbangpol memiliki posisi yang strategis karena selain mengawal urusan pemerintahan umum (4 konsensus Nasional, Politik dan Demokrasi, Ketentraman, ketertiban dan kewaspadaaan Nasional, ketahanan seni, budaya, agama, kemasyarakatan dan ekonomi), sekaligus menjadi mata dan telinga bagi pemerintah daerah untuk menyiapkan berbagai aspek pra kondisi yang bersifat non fisik sebagai prasyarat utama bagi pelaksanaan pembangunan yang bersifat fisik, maka peran dan fungsi Badan Kesbangpol perlu mendapat perhatian.
 - FKUB adalah mitra pemerintah dalam menjaga dan memelihara kerukunan umat beragama, maka perlu mendapat perhatian khususnya dalam hal penguatan kelembagaan, fungsi dan tugas forum dimaksud.
 - Perlu adanya sinergitas program dan kegiatan Badan Kesbangpol Kabupaten/Kota dengan Badan Kesbangpol Provinsi.
 - Perlu adanya sinergitas program dan kegiatan FKUB Kabupaten/Kota se NTT dengan FKUB Provinsi.
- Terlaksananya Rapat Koordinasi Ketahanan Ekonomi pada tanggal 15 Oktober 2019 bertempat di Aula Kantor Badan Kesbangpol Provinsi NTT. Adapun peserta kegiatan berjumlah 90 (Sembilan Puluh) orang terdiri dari: Ormas, UMKM, Bappeda, Dinas Koperasi dan UKM, Dinas Perindustrian, Dinas Sosial, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Hasilnya adalah adanya rekomendasi :

- Pembentukan Pokja ketahanan ekonomi untuk membuat RAN Aksi, pemantauan, data evaluasi (kolaborasi dengan beberapa tim yang sudah dibentuk).
 - Sasaran : Lokasi usaha tambak garam yang berfokus pada Desa Nunkurus, Kec. Kupang Timur, Kab. Kupang (kolaborasi dengan biro ekonomi); Lokasi destinasi wisata (pilot project mengukur kontribusi pariwisata terhadap PDRB); Cluster komoditi usaha ekonomi cabe rawit dan ayam potong; Kolaborasi antara pihak swasta, Pemda dan masyarakat.
 - Penetapan kawasan dalam pengembangan ekonomi kreatif
Sasaran : Skala Kecil : Kuliner, dll. Skala Besar : Kolaborasi kegiatan dengan 22 Desa/Kelurahan model yang telah ditetapkan oleh Ketua Tim PKK Provinsi NTT di 22 Kab/Kota se NTT.
 - Pemerintah daerah memfasilitasi pengadaan sarana dan prasarana dengan prioritas infrastruktur ke daerah-daerah destinasi wisata dan atau daerah potensi pengembangan Sumber Daya Alam.
 - BI, OJK, dan dinas Kopnakertrans bekerja sama memfasilitasi SKIM kredit kepada pelaku UMKM.
 - Lembaga perguruan tinggi memberikan konsep pengembangan ekonomi kreatif melalui hasil penelitian.
 - Mengundang investor untuk pendampingan financing di luar APBD.
- Telaksananya kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pengambilan data Ormas/LSM di 10 Kabupaten/Kota yaitu : Kota Kupang, Kabupaten Kupang, TTS, TTU, Belu, Alor, Flores Timur, Sikka, Manggarai, Manggarai Barat dengan hasil adalah :
- Kabupaten Manggarai Barat : 19 Ormas/ LSM yang diusulkan terdapat 9 yang sudah mendapat nomor SKT, 10 masih dalam tahap verifikasi.
 - Kabupaten Alor : 11 Ormas/ LSM yang mengusulkan, 11 sudah mendapat nomor SKT.
 - Kabupaten Manggarai : 8 Ormas/LSM yang mengusulkan, 8 sudah mendapat nomor SKT.
 - Kota Kupang : 23 Ormas/LSM yang mengusulkan, 23 belum

mendapat nomor SKT.

- Kabupaten Flores Timur : 56 Ormas/LSM yang mendaftar, 56 yang belum mendapat nomor SKT .
- Kabupaten Kupang : 36 Ormas/LSM yang mendaftar, 36 belum mendapat nomor SKT.
- Kabupaten TTS : 35 Ormas/LSM yang mendaftar, 35 belum mendapat nomor SKT.
- Kabupaten Belu : 80 Ormas/LSM yang mendaftar, 15 yang telah mendapat nomor SKT.
- Kabupaten TTU : 23 Ormas/LSM yang mendaftar, 20 yang telah mendapat nomor SKT.

b. Pengukuran capaian kinerja dibandingkan dengan target perjanjian kinerja:

Tabel b.1

Tabel Perbandingan realisasi kinerja tahun 2018 dan 2019

No.	Perjanjian Kinerja (2019)	Indikator Kinerja (2019)	Target Kinerja (2019)	Sasaran Strategis (2019)	Indikator Kinerja (2019)	Target (2019)	Realisasi (2019)
1.	Peningkatan Kesatuan Bangsa dan Politik	Wawasan Politik Kebangsaan.	60	Peningkatan Kesatuan Bangsa dan Politik	Wawasan Politik Kebangsaan.	60%	60%
2.		Jumlah Partai Politik yang dibina.	10		Jumlah Partai Politik yang dibina.	10 Parpol	11 Parpol
3.		Jumlah Lembaga / organisasi kemasyarakatan.	5		Jumlah Lembaga / organisasi kemasyarakatan.	5 Ormas	10 Ormas

Dari Tabel b.1 diatas dapat disimpulkan bahwa :

- Indikator Wawasan Politik Kebangsaan dinilai cukup berhasil karena realisasi mencapai 100% dari target perjanjian kinerja yang telah ditetapkan.
- Indikator Jumlah Partai Politik yang dibina dinilai berhasil karena realisasi mencapai 110% dari target perjanjian kinerja yang telah ditetapkan. Keberhasilan tersebut selain karena kinerja internal organisasi, juga merupakan hasil dari faktor-faktor lain diluar Badan Kesbangpol Provinsi NTT.
- Indikator Jumlah Lembaga / organisasi kemasyarakatan dinilai sangat berhasil karena realisasi mencapai 200% dari target perjanjian kinerja sejumlah 5 (lima) ormas yang dibina, tetapi pada kenyataannya realisasinya mencapai 10 (sepuluh) ormas.

c. Pengukuran capaian kinerja dibandingkan dengan tahun sebelumnya :

Tabel c.1

Tabel Perbandingan realisasi kinerja tahun 2018 dan 2019

No.	Sasaran Strategis (2018)	Indikator Kinerja Tahun (2018)	Kondisi Awal Tahun 2018 (RPJMD)	Sasaran Strategis (2019)	Indikator Kinerja (2019)	Target (2019)	Realisasi (2019)
1.	Peningkatan Kesatuan Bangsa dan Politik	Wawasan Politik Kebangsaan.	50	Peningkatan Kesatuan Bangsa dan Politik	Wawasan Politik Kebangsaan.	60%	60%
2.		Jumlah Partai Politik yang dibina.	10		Jumlah Partai Politik yang dibina.	10 Parpol	11 Parpol
3.		Jumlah Lembaga / organisasi kemasyarakatan.	2		Jumlah Lembaga / organisasi kemasyarakatan.	5 Ormas	10 Ormas

Dari Tabel c.1 dapat dijelaskan bahwa :

1. Adapun realisasi kinerja wawasan politik kebangsaan di tahun 2019 mencapai 60% dari target RPJMD 2018-2023 sebesar 60%. Hal ini menunjukkan realisasi kinerja 100%, yang dilakukan melalui kegiatan Pelaksanaan Lomba Pidato tentang 4 Konsensus Kebangsaan tingkat SMA/SLTA, Dialog Interaktif Radio dan TVRI Lokal dalam rangka Peningkatan Wawasan Kebangsaan yang menghadirkan Gubernur sebagai Narasumber;
2. Sesuai data kondisi awal RPJMD 2018-2023 Partai Politik berjumlah 10, realisasi pembinaan tahun 2019 berjumlah 11 Partai Politik. Hal ini berdasarkan hasil PEMILU 2019 ditetapkan sebanyak 11 Parpol yang mendapatkan kursi di DPRD Provinsi NTT. Untuk itulah Pemerintah Daerah memberikan bantuan keuangan kepada partai politik sebagai fungsi pembinaan politik di daerah;
3. Berdasarkan Undang-Undang 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan peran pemerintah daerah terhadap Ormas adalah fasilitasi kebijakan, seperti membantu proses pembinaan penerbitan surat keterangan terdaftar (SKT) Ormas melalui pembuatan rekomendasi, penguatan kelembagaan Ormas, seperti pemantauan/ pengawasan terhadap keberadaan dan aktivitas Ormas yang sesuai dengan AD/ART Ormas, peningkatan kualitas SDM Ormas, seperti melakukan dialog, sosialisasi ataupun kunjungan langsung ke sekretariat Ormas yang bersangkutan. Namun untuk kegiatan diklat ormas belum dilakukan karena keterbatasan kemampuan keuangan daerah. Untuk

itulah, pada tahun 2018 target 5 Ormas, realisasi tahun 2019 mencapai 100 % atau 10 ormas yang dilakukan pembinaan.

d. **Pengukuran capaian kinerja dibandingkan dengan target dalam pembangunan jangka menengah.**

Tabel d.1

Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2019 dan Target RPMJD

No.	Sasaran Strategis tahun 2019	Indikator Kinerja Tahun 2019	Target Tahun 2019	Realisasi 2019	Target Kinerja RPJMD	Perbandingan Realisasi Tahun 2019 dan target RPJMD
1.	Peningkatan Kesatuan Bangsa dan Politik	Wawasan Politik Kebangsaan.	60%	60%	60%	100%
2.		Jumlah Partai Politik yang dibina.	10 Parpol	11 Parpol	10 Parpol	110%
3.		Jumlah Lembaga / organisasi kemasyarakatan.	5 Ormas	10 Ormas	5 Ormas	200%

Berdasarkan tabel tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

- Pencapaian target kinerja dari indikator Wawasan Politik Kebangsaan mencapai 100 % jika dibandingkan dengan target RPJMD yang hanya sebesar 60 %.
- Pencapaian target kinerja dari indikator Jumlah Partai yang dibina mencapai 110 %, dalam pengertian bahwa penetapan target dalam RPJMD adalah 10 Partai Politik, namun dalam implementasinya Partai Politik yang mengikuti dan memperoleh kursi di DPRD Provinsi NTT adalah sebanyak 11 (sebelas) Partai Politik sesuai Hasil PEMILU Tahun 2019.
- Pencapaian target kinerja dari indikator Jumlah Lembaga/ Organisasi kemasyarakatan mencapai 10 ormas atau 200 %, dalam pengertian bahwa penetapan target dalam RPJMD adalah 5 Ormas, namun implementasinya Ormas yang dibina melebihi target yang ditentukan dalam RPJMD.

e. Analisis Efisiensi penggunaan sumberdaya dikaitkan dengan hasil (kinerja) yang telah dicapai;

Tabel 6.1
ASN berdasarkan Jenis Kelamin dan Jenjang Pendidikan

Instansi	Laki – Laki	Perempuan	S2	S1	SMA	SMP
Kesbangpol Provinsi NTT	33 PNS	12 PNS	6	26	12	1
Total	45 PNS					

Penggunaan sumber daya dalam rangka mendukung pelaksanaan program/kegiatan terdiri atas dua yaitu efisiensi sumber daya biaya dan sumber daya manusia. Presentasi efisiensi sumber daya biaya dapat di hitung dengan rumus :

$$\% Efisiensi Biaya = 100\% - \left[\frac{Realisasi Biaya}{Target Biaya} \times 100\% \right]$$

Pada tahun 2019 realisasi biaya untuk program utama yang mendukung keberhasilan kesbangpol Provinsi NTT adalah program pengelolaan perbatasan, pembinaan politik dan perlindungan masyarakat sebesar Rp. 2.216.310.080, sementara target biaya 2.380.146.300 dengan rumus efisiensi di atas, diperoleh persentase efisiensi biaya sebesar 6,88 % .

Upaya efisiensi penggunaan sumber daya manusia telah dilaksanakan dengan baik, dimana jumlah ASN sebanyak 45 orang (Tabel 6.1) dengan jenjang Pendidikan yang terbatas dapat menyelesaikan program dan kegiatan pada Badan Kesbangpol Provinsi NTT dengan presentase 93,12 %.

f. Analisis program dan kegiatan yang mendukung pencapaian kinerja.

Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian sasaran strategis sebanyak 1 (satu) program dan 10 (sepuluh) kegiatan. Adapun pencapaian dari setiap program dan kegiatan tersebut dapat diuraikan di bawah ini :

- ✚ Program Pengelolaan Perbatasan, Pembinaan Politik dan Perlindungan Masyarakat

Tabel f.1
Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja

Program/Kegiatan	Indikator	Kinerja		
		Target	Realisasi	Capaian %
Program Pembinaan Politik dan Perlindungan Masyarakat				
Peningkatan Wawasan Kebangsaan	1 Wawasan Politik Kebangsaan.	60%	60%	100%
Penguatan Kelembagaan FKUB, FPK dan FKDM				
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Terpadu				
Peningkatan Kewaspadaan Nasional				
Peningkatan Kerjasama Penanganan Aktivitas Orang Asing dan Lembaga Asing				
Peningkatan Kerjasama dengan Aparat Keamanan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan				
Penguatan Pokja Indeks Demokrasi Indonesia Tingkat Provinsi	2 Jumlah Partai Politik yang dibina.	10 Parpol	11 Parpol	110%
Penyuluhan Peraturan Perundang-undangan Bidang Politik				
Verifikasi Bantuan Keuangan Partai Politik				
Koordinasi Peningkatan dan Pembinaan Ketahanan Seni, Budaya, Agama, Kemasyarakatan dan Ekonomi	3 Jumlah Lembaga / organisasi kemasyarakatan.	5 Ormas	10 Ormas	200%

Dari Tabel di atas, dapat dijelaskan sebagai berikut :

- Analisis Indikator Wawasan Politik Kebangsaan

Pelaksanaan kegiatan dalam rangka mendukung tujuan indikator Wawasan Politik Kebangsaan adalah untuk Memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa melalui pemantapan ideologi, wawasan kebangsaan serta Peningkatan kondisi keamanan pembangunan yang kondusif. Output dari tujuan tersebut diatas adalah :

- a) Terwujudnya Pembinaan Ideologi dan Wawasan Kebangsaan melalui kegiatan :

- ✓ Peningkatan Wawasan Kebangsaan
- ✓ Penguatan Kelembagaan FKUB, FPK dan FKDM
- b) Terlaksananya Koordinasi Peningkatan Kewaspadaan Nasional melalui kegiatan :
 - ✓ Peningkatan Kewaspadaan Nasional
 - ✓ Verifikasi Bantuan Keuangan Partai Politik
 - ✓ Peningkatan Kerjasama Penanganan Aktivitas Orang Asing dan Lembaga Asing
 - ✓ Peningkatan Kerjasama dengan Aparat Keamanan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan
- Analisis Indikator Jumlah Partai Politik yang dibina.
 Pelaksanaan kegiatan dalam rangka mendukung tujuan indikator jumlah partai politik yang dibina adalah Pembangunan politik di daerah melalui sistem politik yang demokratis dan berkedaulatan rakyat. Output dari tujuan tersebut diatas adalah :
 - a) Terwujudnya pembangunan politik dan demokrasi di Provinsi Nusa Tenggara Timur melalui kegiatan :
 - ✓ Penyuluhan Peraturan Perundang-undangan Bidang Politik
 - b) Terwujudnya Koordinasi Pengendalian dan evaluasi implementasi kebijakan publik dan politik melalui kegiatan :
 - ✓ Penguatan Pokja Indeks Demokrasi Indonesia Tingkat Provinsi
 - ✓ Verifikasi Bantuan Keuangan Partai Politik
- Analisis Indikator Jumlah Lembaga / organisasi kemasyarakatan
 Pelaksanaan kegiatan dalam rangka mendukung tujuan indikator Jumlah Lembaga / organisasi kemasyarakatan adalah Peningkatan koordinasi, kerjasama dan konsolidasi Ketahanan Seni, Budaya, Agama, Kemasyarakatan dan Ekonomi untuk mewujudkan keutuhan dan kesejahteraan masyarakat. Output dari tujuan tersebut diatas adalah Terwujudnya Peningkatan koordinasi, kerjasama dan konsolidasi Ketahanan Seni, Budaya, Agama, Kemasyarakatan dan Ekonomi.



PENUTUP

Demikian Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2019 ini disampaikan sebagai bentuk laporan atas penyelenggaraan urusan maupun tugas dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Nusa Tenggara Timur selama Tahun 2019.

Kupang, 11 Februari 2020

